PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

(Studi Pada Desa Balapulang Wetan)

SKRIPSI

Oleh:

Nama: Ricky Prayogi

Nomor Mahasiswa: 15312424

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

(STUDI PADA DESA BALAPULANG WETAN)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai

derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada

Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Nama : Ricky Prayogi

No. Mahasiswa : 15312424

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan didalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 16 September 2019

Penulis,

(Ricky Prayogi)

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

(Studi Pada Desa Balapulang Wetan)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Ricky Prayogi

Nomor Mahasiswa : 15312424

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 17 September 2019

Dosen Pembimbing,

(Ataina Hudayati,Dra.,M.si.,Ph.D.,Ak.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

Disusun Oleh : **RICKY PRAYOGI**

Nomor Mahasiswa : **15312424**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 8 Oktober 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Ataina Hudayati, Dra., Ak., M.Si.,Ph.D. .....

Penguji : Yuni Nustini, Dra., MAFIS., Ak., CA., Ph.D. .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

MOTTO

"Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna." (Albert Einstein)

"*Takut gagal bukan alasan untuk tidak mencoba sesuatu."* (Frederick Smith)

*"Kesempatan dan peluang tidak tercipta begitu saja. Kamu yang menciptakannya." (*Chris Grosser)

"Mulailah dari mana Anda berada. Gunakan apa yang Anda miliki. Lakukan apa yang Anda bisa." (Arthur Ashe)

"Tuhan tidak mengubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah nasibnya sendiri." (Bung karno)

"Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri."

*(*R.A. Kartini)

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis sampaikan atas kehadiratAllah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis junjungan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat-Nya terus menerus kepada umat islam hingga saat ini.

Skripsi dengan judul "PengaruhTransparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa" disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dra. Ataina Hudayati,. M.Si., Ph.D., Ak. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing saya dalam pembuatan skripsi ini.
6. Kepala Keluarga di Desa Balapulang Wetan yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner saya.
7. Bapak dan Ibu tercinta yang sudah memberi pelajaran hidup sampai sekarang, dan memberi semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi.
8. Risa Putri Verdiana dan Suami yang membimbing dan memberikan saran selama mengerjakan skripsi.
9. Rexy Prayogi selaku kembaransaya tercinta yang telah memberikan semangat dan motivasinya tanpa henti.
10. Saudara dan saudari Desy, Digna, Hakim, Dani, Irfan, Najwa, Restu, Fani, Nabila dan Arya yang sudah memberikan dukungan dan doa.
11. Helfrida Diah Ayu N selaku pengawas yang selalu menjaga dan memotivasi penulis untuk terus mengerjakan skripsi.

12. Teman-teman Alumni SMP 1 Balapulang yang selalu memberi semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi.
13. Teman-teman “BLPGK” Dwiki, Didik, Bayu, Tono, Wulan, Ai, Laras yang memberikan semangat dalam menyelesaikan Skripsi.
14. Teman-teman seperjuangan Pramuka SMAN 3 Slawi yang mendorong untuk menyelesaikan skripsi.
15. Teman-teman “SMAN 3 Slawi kelas 12” Septian, Ali, Rizqon, Byan, Arden, Mizan, Gama, Akbar, telah memberikan warna didalam kehidupan saya serta sumber semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
16. Teman-teman seperjuangan kuliah Muzaki, Citra, Arden, Fuad, Dayat, Abi, Ian, Nadya, Marissa, Vivi, Nanda, Nova, Ulyvianti, dan Vavin yang telah memberikan pelajaran berharga selama berada di Yogyakarta, selalu memberikan dukungan dan motivasi, serta sumber semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
17. Teman-teman “Badminton” Asep, Artha, Afif, Cahyo, Risang, Ezra, Gheo, Iqbal, dan Risad yang memberikan semangat dan waktu dalam mengisi kekosongan selama di Yogyakarta.
18. Teman-teman “Alumni Kos Pawirokuwat” Hammam, Rizky, Muftah, Miftah, Helmi, Trihatmaja, Hary, Nadzim dan Arul yang memberikan dorongan dan mengisi hari-hari selama di kosan untuk penulis menyelesaikan skripsi.

19. Teman-teman “OCB K” yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa didalam maupun diluar kampus.
20. Teman-teman KKN Unit 53 Magelang Mas Adit, Papuji, Afrian, Zulhan, Istiq, Isti dan Amel yang telah dipersatukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Terimakasih telah memberikan pengalaman yang berharga.
21. Teman-teman seperjuangan bimbingan skripsi, terimakasih atas bantuan dan *sharing* kalian dalam penulis mengerjakan skripsi.
22. Teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu penulis dan saling berbagi pengalaman sehingga penulis dapat mencapai di titik sekarang ini.

Terima kasih atas segala bantuan, doa dan dukungan telah diberikan olehseluruh pihak kepada penulis. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan selalu memberikan karunia, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis,

(Ricky Prayogi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN SAMPUL ii

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

MOTTO v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR xv

DAFTAR LAMPIRAN xix

ABSTRACT xx

ABSTRAK xxii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Tujuan Penelitian 9

1.3 Manfaat Penelitian 10

1.4 Sistematika Penulisan Skripsi 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA 13

2.1 Landasan Teori 13

2.1.1 Teori Agensi 13

2.1.2 Teori Stewardship 14

2.1.3 Transparansi 16
2.1.4 Akuntabilitas 19
2.1.5 Pengelolaan Dana Desa 20
2.1.6 Kepercayaan, Kinerja, dan Peran Pemerintah Desa 22
2.1.6.1 Kepercayaan 22
2.1.6.2 Kinerja 25
2.1.6.3 Peranan 25
2.1.6.4 Pemerintah Desa 27
2.1.7 Konsep Partisipasi Masyarakat 30
2.1.7.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat 30
2.1.7.2 Dimensi dan Indikator Partisipasi Masyarakat 31
2.1.8 Konsep Pembangunan Desa 35
2.1.8.1 Pengertian Pembangunan Desa 35
2.1.8.2 Dimensi dan Indikator Pembangunan Desa 36
2.2 Penelitian Terdahulu 37
2.3 Kerangka Penelitian 42
2.4 Hipotesis Penelitian 42
2.4.1 Pengaruh Transparansi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa 42
2.4.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa 44
2.4.3 Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa 46
BAB III METODE PENELITIAN 48
3.1 Jenis Penelitian 48
3.2 Fokus Penelitian 49

3.3 Populasi dan Sampel 49

3.4 Data dan Sumber Data..... 50

3.5 Metode Pengumpulan Data 51

3.6 Variabel Penelitian..... 53

3.7 Definisi Operasional Variabel 53

3.7.1 Variabel Independen (X) 54

3.7.2 Variabel Dependen (Y)..... 58

3.8 Metode Analisis Data..... 59

3.8.1 Mengolah Hasil Kuesioner 59

3.8.2 Uji Instrumen 60

3.8.2.1 Uji Validitas 60

3.8.2.2 Uji Reliabilitas 60

3.8.3 Uji Asumsi Klasik 61

3.8.3.1 Uji Normalitas..... 61

3.8.3.2 Uji Multikoliniearitas 62

3.8.3.3 Uji Heteroskedastisitas 62

3.8.4 Analisis Statistik/Analisis Regresi Berganda..... 62

3.8.5 Koefisien Determinasi 63

3.8.6 Uji Hipotesis 64

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 65

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian dan Hasil Data Responden 65

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 65

4.1.2 Hasil Data Responden 66

4.2 Analisis Data Deskriptif 67

4.2.1 Hasil Penyebaran Kuesioner 67

4.2.2 Pengujian Instrumen Penelitian..... 68

4.2.2.1 Uji Validitas 68

4.2.2.2 Uji Reliabilitas 71

4.2.3 Uji Asumsi Klasik 73

4.2.3.1 Uji Normalitas 73

4.2.3.2 Uji Multikonearitas 74

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas 76

4.2.4 Uji Hipotesis 77

4.2.4.1 Analisis Regresi Berganda..... 77

4.2.5 Uji Koefisien Determinasi 79

4.2.6 Hasil Uji Hipotesis 80

4.2.6.1 Uji Signifikan Parsial (Uji T)..... 80

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian..... 83

BAB V PENUTUP 86

5.1 Kesimpulan 86

5.2 Saran..... 87

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN 91

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Item Pertanyaan Variabel Transparansi 55

Tabel 3.2 Item Pertanyaan Variabel Akuntabilitas 56

Tabel 3.3 Item Pertanyaan Variabel Kepercayaan kepada Pemerintah Desa 56

Tabel 3.4 Item Pertanyaan Variabel Partisipasi Masyarakat 58

Tabel 4.1 Tabel Responden 66

Tabel 4.2 Tabel Uji Statistik Deskriptif 67

Tabel 4.3 Uji Validitas Variabel Transparansi 68

Tabel 4.4 Uji Validitas Variabel Akuntabilitas 69

Tabel 4.5 Uji Validitas Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa 70

Tabel 4.6 Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa 71

Tabel 4.7 Reliabilitas Variabel Transparansi 72

Tabel 4.8 Reliabilitas Variabel Akuntabilitas 72

Tabel 4.9 Reliabilitas Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa 73

Tabel 4.10 Reliabilitas Variabel Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa 73

Tabel 4.11 Uji Normalitas 74

Tabel 4.12 Uji Multikolinearitas 75

Tabel 4.13 Uji Heteroskedastisitas 76

Tabel 4.14 Uji Analisis Regresi Berganda 77

Tabel 4.15 Uji Koefisien Determinasi 79

Tabel 4.16 Uji Signifikan Parsial 81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner 92
Lampiran 2 Data penyebaran Kuesioner 96
Lampiran 3 Hasil Data Responden pernyataan Transparansi 97
Lampiran 4 Hasil Data Responden pernyataan Akuntabilitas..... 100
Lampiran 5 Hasil Data Responden pernyataan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa 103
Lampiran 6 Hasil Data Responden pernyataan Partisipasi Masyarajkat ... 106

THE INFLUENCE OF TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY, AND RELIENCE TOWARDS THE VILLAGE GOVERNMENT ON THE PUBLIC WITHIN THE VILLAGE DEVELOPMENT

(Study on the Village of Balapulang Wetan)

Ricky Prayogi

Accounting study program, Faculty of Economics, Islamic University of Indonesia, Yogyakarta

ABSRACT

This research is intended to acknowledge the influence of transparency, accountability, and reliance on the village government on the public within the village development.The type of research that is using, is quantitative. With the population of the Balapulang Wetan villagers. The taking technique in this research is using the purposive sampling technique, where the researcher gives specific criteria for each of the population members to be the sample, which gaining up to 108 respondents. The data will be obtained by spreading questioner to the villagers of Balapulang Wetan. This research is using double linear regression analysis.Base on this research, the researcher could conclude that transparency, accountability, and reliance on the government of the village is taking a positive and significant effect on the public participation within the development of the Balapulang Wetan Village.

Keywords :*Transparency, Accountability, Reliance towards government, and public participation within the development.*

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

(Studi Pada Desa Balapulang Wetan)

Ricky Prayogi

Program Studi Akuntandi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan kepada pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Dengan populasi warga desa balapulang wetan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana peneliti memberikan kriteria khusus bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel sehingga mendapat 108 responden. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada warga desa balapulang wetan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan kepada pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Balapulang Wetan.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Kepercayaan Kepada Pemerintah, dan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan sering dikonsepsikan sebagai upaya dalam merubah dari suatu kondisi sosial ke kondisi sosial yang lain yang dianggap lebih baik oleh pihak-pihak yang ingin melakukan perubahan. Dalam pembangunan ini standar atau parameter yang harus dicapai setelah proses perubahan tersebut dilakukan setelah ditetapkan terlebih dahulu. Untuk mencapai standar yang diharapkan tersebut tentu saja dibutuhkan perencanaan. Oleh karena itulah pembangunan sering disebut juga sebagai perubahan sosial terencana.Dalam konteks pemerintahan maka yang dimaksud agen pembangunan di sini adalah Pemerintah. Artinya, pemerintahlah yang bertanggung jawab dalam melakukan perubahan. Kepala desa (kades) menjadi pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dalam pembangunan desa. Ia merupakan seorang manager pemerintahan. Selain itu, ia juga seorang pimpinan yang sekaligus pemimpin. Oleh karena itu, ia juga menjadi pengambil keputusan dalam setiap kebijakan dan program di tingkat desa dan menjadi bagian utama dari kelas elit penguasa. Atas kondisi tersebut, kepala desa menjadi figur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Dalam usaha peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan, pemerintah sering kali menghadapi kendala dari pembiayaan dan penolakan

dari masyarakat itu sendiri, hal ini bisa terjadi karena infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka dari itu pemerintah mengambil kesimpulan bahwa masyarakat perlu terlibat dengan pembangunan itu sendiri. Dengan partisipasi masyarakat diharapkan akan menjawab kedua permasalahan diatas, tetapi tidak hanya itu saja, akan ada lagi keuntungan lain yang akan diperoleh kedua belah pihak dari pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri. Partisipasi itu sendiri adalah pengembangan atau kegiatan masyarakat, pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) masyarakat dari awal ide dan nyata dari berbagai pihak pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan kegiatan. Masyarakat yang terlibat dalam pengembangan pedesaan akan sadar bahwa apa yang dilakukan oleh mereka sangat penting untuk pembangunan.

Keberadaaan akuntabilitas juga begitu vital terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah. Kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut senantiasa dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanatkan kepada lembaga tesebut Peran masyarakat penting dalam melakukan kontrol terhadap lembaga atau institusi yang diberikan amanah oleh rakyat untuk menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan anggaran sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Akuntabiltas dapat diformalkan melalui Undang-Undang, aturan, peraturan, dan pemerintah pengadilan atau didasarkan pada sejumlah pemeriksaan dan keseimbangan

informal yang dikembangkan melalui konotasi langsung, rumor dukungan, ancaman oposisi atau tipe rumusan lain yang dipahami namun tak tertulis (Mangaukang, 2016 dalam Nahruddin, 2017).

Sementara transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya. Transparansi memungkin semua stakeholders dapat melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya, serta laporan (pertanggungjawaban) periode yang lalu. Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya. Konsep keadilan berarti bahwa masyarakat diperlakukan secara sama di bawah hukum, dan mempunyai derajat yang sama dalam partisipasi politik dalam pemerintahannya. Transparansi, akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi (Shende dan Bennett, 2004 dalam Nahruddin, 2017).

Era kepemimpinan sekarang ini memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita. Salah satu program dari Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata (Prasetyo, 2017). Dengan alasan tersebut, maka Presiden Joko Widodo mengalokasikan

bantuan untuk setiap desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana pemukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru khususnya dalam hal pengelolaan. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai

dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhanuddin, & Lubis, 2014). Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan (Mondong, 2013). UU Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitiannya, (Ismail, Widagdo, & Widodo, 2016) menyebutkan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Meskipun demikan, terdapat Badan Perwakilan Daerah (BPD) merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa. Tujuan dari BPD yaitu untuk mewakili masyarakat dan memiliki beberapa fungsi, yang salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh BPD yakni memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien dan juga dalam pelaksanaan Dana Desa, pemerintah daerah wajib membina dalam pengelolaan Dana Desa.

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo yang diberitakan melalui finance.detik.com menjelaskan Dana Desa yang diberikan oleh APBN diproyeksikan mencapai satu milyar lebih tiap tahunnya, peningkatan anggaran untuk desa ini seharusnya dilakukan pada 2018 namun berdasarkan hasil evaluasinya baru dapat dilakukan pada 2019. Dari hasil evaluasi, alokasi anggaran dana desa efektif dalam mengentaskan kemiskinan, menyerap tenaga kerja, meningatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, serta mengatasi ketimpangan antar desa. Dari keempat itu, ternyata memang dana desa pelaksanaannya berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin, gini ratio di pedesaan, tetapi memang peningkatannya itu tidak masif, belum terlalu masif, artinya multiplier efeknya masih belum optimal, ungkap dia.Dengan belum optimalnya pemanfaatan dana desa, maka pemerintah akan memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), mulai dari kemampuan para aparat desa dalam mengelola sehingga tidak ada yang disalah gunakan.

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan ADD sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku serta dapat terwujud karena adanya pengawasan internal maupun eksternal. Dengan adanya pengawasan tersebut memunculkan adanya kesadaran bahwa program yang didanai dari ADD harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya (Setiawan, Haboddin, & Wilujeng, 2017)

Penelitian yang lainnya mengenai Transparansi dan Pengelolaan Dana Dana Desa yang dilakukan oleh menunjukkan bahwa keterbukaan proses kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, penyusunan rencana kegiatan dana desa yang tertuang dalam DURK dapat terselesaikan dengan baik, namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa, dan peraturan prosedur pelayanan menunjukan bahwa dalam pelaksanaan rencana pembuatan Peraturan Desa (PERDES), tentang Anggarang Pendapatan Belanja Desa (APBDes), di desa Tabang masih mengalami beberapa masalah. diantaranya dalam pembuatan Peraturan Desa (PERDES), tentang Anggarang Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dan peraturan-peraturan lain meskipun sudah berjalan dengan baik, karena BPD dan Pemerintah Desa sudah sejalan. alasan lainya semua anggota BPD itu lahir dari pendukung Kepala Desa waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala desa, sehingga semua BPD selalu mengikuti perintah dari Kepala Desa (Tundunaung, Lumolos, & Mantiri, 2018).

Penelitian lainnya mengenai Kepemimpinan, Modal Sosial, dan Pembangunan Desa menunjukkan keberhasilan pembangunan di suatu desa akan terkait dengan sumber daya (resouces) yang dimilikinya. Ketika desa kurang memiliki sumber daya ekonomi dan manusia, maka kehadiran sumber daya sosial (modal sosial) dapat dijadikan modal atau energi untuk dapat membangun desa. Dalam konteks Desa Pangauban, modal sosial yang teridentifikasi terdiri dari partisipasimasyarakat, kepedulian terhadap sesama

(nilai), kebersamaan (resiprocity), kepercayaan (trust), ketaatan pada aturan pengambilan keputusan (norma), dan proaktif dalam berbagai kegiatan pembanguna desa (Saefulrahman, 2015).

Penelitian yang lain mengenai Kinerja Pemerintah desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan desa dalam pembangunan infrastruktur mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat, yang dapat dilihat dari produktivitas, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas pemerintah desa untuk mewujudkan pembangunan yang bersifat partisipatif perlu adanya partisipasi masyarakat yang pro aktif untuk mendukung pembangunan desa (Rosalina, 2013).

Penelitian terdahulu mengenai Partisipasi Masyarakat dan Proses Pembangunan Infrastruktur Desa menunjukkan bahwa : pertama, bentuk partisipasi masyarakat pada tahap persiapan berupa kehadiran dan sumbangan ide atau pemikiran, pada tahap pelaksanaan bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga, dana dan material, pada tahap pemeliharaan bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga. Kedua, aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat yaitu jumlah keluargasejahtera, jenis pekerjaan. Sementara tingkat pendidikan hanya berpengaruh pada tahap perencanaan, sementara homogenitas masyarakat desa tidak memiliki hubungan yang erat dengan partisipasi masyarakat (Todaro, 1998).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian guna untuk mendapatkan informasi mengenai pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan judul penelitian “Pengaruh

Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa".

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Transparansi Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa ?
2. Apakah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa ?
3. Apakah Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa ?

1.2 Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui pengaruh Transparansi Pengelolaan Dana Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.
2. Ingin mengetahui pengaruhAkuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.
3. Ingin mengetahui pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis paparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai akuntabilitas, transparansi dan peran masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan saran atas masukan-masukan yang diterima saat melakukan penelitian.

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat untuk :

1. Akademisi

   Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Perubahan dan perkembangan lingkungan pemerintah yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam hal pengelolaan Dana Desa. Masalah tersebut memicu permintaan terhadap penelitian untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi.

2. Masyarakat

   Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam rangka untuk mewujudkan Akuntabilitas, Transparansi, Kepercayaan Kepala Desa dan Peran Masyarakat dari pemerintah desa.

3. Pemerintah

   Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah Desa, Kabupatem, dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi dengan judul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Kinerja Kepada Pemerintah Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Tersusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai arti penting dari penelitian, apa yang diteliti, dan untuk apa penelitian ini dilakukan. Sehingga dari permasalahan-permasalahan yang dibahas akan membuat suatu rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat yang akan diperoleh, serta sistematika penulisan.

Bab II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori-teori atas penelitian yang dilakukan. Yang mana nantinya teori menjadi dasar membantu penyusunan penelitian. Dalam bab ini juga akan dikemukakan mengenai tinjauan penelitian terdahulu.

Bab III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian, jenis data yang dipilih, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan pembahasan yang menjelaskan mengenai temuan-temuan yang didapatkan selama melakukan penelitian.

Bab V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan memberikan saran untuk perbaikan pada penelitian di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa teori agensi yaitu kontrak antara manajer (pihak agen) dengan pemilik (pihak principal). Hubungan kontraktual dapat berjalan dengan baik, apabila pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Hubungan keagenan yaitu pihak principal yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent* untuk melakukan semua kegiatan atas nama*principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud principals adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya (Ismail et al., 2016).

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agen/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principals) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Widagdo, Widodo, & Ismail., 2016). Menurut Eisenhardt (1989), menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: 1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), 2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality) 3. Manusia selalu menghindari resiko (risk averse). Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat diihat bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara aparat pemerintah dengan rakyatnya dipicu adanya sifat dasar tersebut. Aparat pemerintah dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan untuk meningkatkan nilai suatu organisasi atau pemerintahan.

2.1.2 Stewardship Theory

Menurut teori stewardship, pemilik (principal stakeholders) perusahaan adalah direktur dan karyawan (principals dan steward). Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mempunyai dasar

psikologi dan sosiologi yang telah tersusun, dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principals, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya.

Teori stewardship didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan (stewardess) dapat memotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik bagi principal-nya (Donaldson & Davis, 1989, 1991). Selanjutnya (Chin, 2000) stewardship theory dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yaitu bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.

Berdasarkan teori ini kedua kelompok yaitu principal dan steward bekerja bersama-sama guna meningkatkan kesejahteraan sesuai keinginan mereka. Principals merekrut pegawai berdasarkan kemampuan mereka dalam menggerakkan sumber daya organisasi guna memaksimalkan stakeholder benefit. Berdasarkan asumsi teori stewardship yang menyatakan bahwa manajer akan berusaha mengelola sumber daya secara maksimal dan mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan organisasi dan bekerja berdasarkan pemikiran bahwa keuntungan (pemenuhan kebutuhan) manajer atau steward dan pemilik atau principals berasal dari perusahaan yang kuat secara organisasi maksimal, terutama dalam upaya penciptaan nilai bagi perusahaan, maka itu artinya manajer telah memenuhi aspek psikologi dari teori ini. Penciptaan nilai (value creation) dalam konteks ini adalah dengan

memanfaatkan secara optimal seluruh potensi asset perusahaan, baik karyawan (human capital), asset fisik (physical capital), maupun structural capital. Pengelolaan yang baik atas seluruh potensi ini akan menciptakan value added bagi perusahaan yang kemudian dapat mendorong kinerja keuangan perusahaan untuk kepentingan stakeholders.

Meskipun demikian, pada akhirnya pegawai bekerja adalah guna memenuhi kebutuhan psikologis dan sosiologis mereka sendiri (Davis, Schorman & Donaldson, 1997). Selanjutnya dapat dikatakan bahwa kedua pihak tersebut tidak berusaha meningkatkan nilai bagi pihak stakeholders yang lain, oleh sebab itu, nilai tambah seperti pembayaran bunga kepada kreditor dan pembayaran pajak kepada pemerintah merupakan hal diluar keinginan pemilik dan pegawai. Bahkan, nilai tambah seperti diatas dianggap sebagai efek samping dari usaha meningkatkan kesejahteraan pemilik dan keuntungan manajer.

2.1.3 Transparansi

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.Transparansi merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut sehingga semua pihak yang telibat mengetahui apa yang dilakukan oleh

organisasi, termasuk prosedur, dan keputusan yang diambil oleh organisasi dalam pelaksnaan urusan publik atau kegiatannya(Ikhwandha, 2018).

Transparansi mengisyaratkan bahwa pengelolaan dana desa tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat. Sekarang ini, banyak negara mengklasifikasikan catatan atau laporan sebagai *Top Secret, Secret, Confidential dan Restricted*, dan *Official Secrets Acts* membuat *unauthorized disclosure* terhadap suatu *criminal offence*. Kultur secara umum di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, adalah kerahasian (Shende & Bennet, 2004 dalam Nahruddin, 2017). Tanpa adanya keterbukaan dan pelibatan publik sebagai suatu jejaring dalam pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan didaerah hanya akan mengarah pada pemerintahan yang cenderung korup dan lemah dari sisi akuntabilitas. Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Menurut (Krina, 2003 dalam Nahruddin, 2017) prinsip ini menekankan kepada 2 aspek yakni komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Menurut (Krina, 2003 dalam Nahruddin, 2017) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :

a) Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab.
b) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.

c) Kemudahan akses informasi.

d) Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Karin (2003) mengatakan prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut:

a) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan public.

b) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagaikebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor public.

c) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran, penetapan anggaran, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat, maka dalam proses pengembangan wacana publik di daerah sebagai salah satu instrumen kontrol pengelolaan anggaran daerah, perlu diberikan keleluasaan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kinerja dan akuntabilitas anggaran. Oleh karena itu, anggaran daerah harus mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk kepentingan masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dalam format yang akomodatif dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengendalian anggaran daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan proyek dan kegiatan harus dilaksanakan secara terbuka

dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun ekonomis kepada pihak legislatif, masyarakat maupun pihak-pihak yang bersifat independen yang memerlukan.

2.1.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan dari sumber daya yang telah diberikan kepada seseorang serta pelaksanaan yang telah dikerjakan sebagai bentuk kebijakan yang dipercayakan kepada suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas dan kegiatan organisasi yang dituangkan dalam bentuk pelaporan olehpihak yang diberi tanggung jawab kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu (Ikhwandha, 2018).

Kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka ntuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi yang tidak dapat diukur (kualitas) maupun dari segi yang dapat diukur (kuantitas) merupakan arti dari akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah sendiri merupakan pelaku yang harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya pada masyarakat dalam proses yang dijalankannya tugas maupun wewenang, serta kewajiban Pemerintah Daerah (Sabarno, 2007 dalam Hanifah & Praptoyo, 2015).

Sistem pemerintahan saat ini, membuat desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan untuk:

a) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
c) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
d) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
e) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
f) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

2.1.5 Penggelolaan Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber dari APBN disebutkan : Pasal 5 1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Untuk Desa. 2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Pengelolaan ADD dalam Keuangan Desa (APBDes) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Oleh karenanya, proses dan mekanisme penyusunan APBDesa yang diatur dalam Permendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang, dan kepada siapa bertanggungjawab, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007. Secara umum, pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:

a) Pengelolaan keuangan direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan

Desa tentang APBDesa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa,

b) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hokum,

c) Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat, dan

d) Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

2.1.6 Kepercayaan, Kinerja dan Peranan Pemerintah Desa

2.1.6.1 Kepercayaan

Menurut Blind 2006 (dalam Putra, 2013) kepercayaan secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *political trust* (kepercayaan politik) dan *social trust* (kepercayaan sosial). Kepercayaan politik yaitu kepercayaan yang dinilai kedalam bentuk politik. Kepercayaan itu terjadi ketika masyarakat menilai pemerintahan dan institusinya, pembuatan kebijakan secara umum dan atau para pemimpin politik secara individual berjanji untuk menepati, efisien, adil dan jujur. Jika institusi pemerintah, pejabat publik dan kebijakan yang dibuat oleh mereka dinilai baik oleh masyarakat maka masyarakat mempunyai kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan sering diartikan sebagai suatu kondisi dimana warga dapat menyerahkan nasibnya kepada pemerintah dan para pejabat publik karena dianggap akan selalu mengurus kepentingan warga secara baik (Dwiyanto, 2011 dalam Putra, 2013).Sedangkan social trust adalah kepecayaan yang merujuk pada masyarakat yang saling percaya antar anggota komunitas sosial satu dengan

lainya. Seperti halnya yang di kemukakan oleh (Dwiyanto 2011 dalam Putra 2013) dalam bukunya Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi mengatakan bahwa kepercayaan sosial dapat dideskripsikan seperti ketika warga percaya bahwa tetangganya adalah orang baik yang akan selalu ikut menjaga harta bendanya selama mereka meninggalkan rumah atau sedang bepergian. Dengan begitu warga yang memiliki kepercayaan sosial akan tetap merasa aman, tenang dan nyaman walau rumah dan harta bendanya ditinggalkan beberapa lama (Putnam 1993 dalam Putra 2013) mengatakan bahwa dengan adanya partisipasi warga dalam kegiatan sosial dan saling percaya diantara sesama warga dapat memberikan kontribusi terhadap terbentuknya kepercayaan politik. Interaksi yang terjadi antar warga dalam kegiatan sosial dan pemerintahan bukan hanya akan membuat warga memiliki kepercayaan yang semakin tinggi terhadap warga lainnya tetapi juga terhadap pemerintah.

Kepercayaan kognitif adalah kepercayaan atau keinginan pelanggan mengandalkan kompetensi dan keandalan penyedia layanan. Kepercayaan itu muncul dari sebuah akumulasi pengetahuan yang memungkinkan seseorang untuk membuat prediksi, dengan beberapa tingkat kepercayaan, mengenai kemungkinan bahwa mitra akan memenuhi kewajibannya(Ikhwandha, 2018).Kepercayaan afektif adalah kepercayaan kepada mitra atas dasar perasaan yang dihasilkan oleh tingkat perhatian mitra/perusahaan kepada konsumen. Kepercayaan afektif iniditandai dengan perasaan aman yang dirasakan konsumen ketika berinteraksi dengan perusahaan. Kepercayaan afektif sangat terkait dengan persepsi bahwa

tindakan mitra termotivasi secara intrinsik (Johnson & Grayson, 2005dalam Ikhwandha, 2018)

Kepercayaan adalah faktor penting dalam transaksi pertukaran antar mitra bisnis. Kepercayaan dalam suatu hubungan yang dapat didasarkan pada aspek rasional (cognitive) Serta berdasarkan aspek emosional (afektif). Beberapa penelitian menyatakan bahwa kedua jenis kepercayaan tersebut harus dibedakan karena keduanya mempengaruhi efektifitas organisasi secara berbeda. Reputasi mitra yang memuaskan dapat menyebabkan kepercayaan kognitif, yang padagilirannya mempengaruhi kesediaan untuk bekerjasama dengan mitra bisnis. Kepercayaan afektif bisa timbul jika kedua belah pihak yang bermitra telahmempunyai ikatan emosi yang memungkinkan masing-masing pihak merasa amansaat bertransaksi/bekerja sama. Kepercayaan dapat didefinisikan sebagai satu kesediaan satu pihak terhadap pihak lain berdasarkan keyakinan bahwa pihak lain adalah kompeten, terbuka,peduli, dan dapat diandalkan(Zur et al., 2012 dalam Ikhwandha, 2018).

Aspek Kognitifberisi apa yang diketahui mengenai suatu objek, bagaimana pengalaman tentang suatu objek dan bagaimana pendapat atau pandangan tentu objek suatu objek. Aspek kognitif berkaitan dengan kepercayaan

kita, teori, harapan, sebab dan akibat dari suatu kepercayaan, dan persepsi relatif terhadap objek tertentu. Sedangkan Aspek Afektif berisi apa yang dirasakan mengenai suatu objek, jadi komponen afektif berisi emosi. Afektif sebagai komponen yang menunjukkan perasaan, respek atau perhatian kita terhadap objek

tertentu, seperti ketakutan, kesukaan, atau kemarahan (Liliweri, 2011 dalam Ikhwandha, 2018).

2.1.6.2 Kinerja

Kinerja adalah gambaran umum yang menggambarkan tentang pelaksanaan suatu kegiatan yang telah dicapai atau kebijakan dalam mewujudkan suatu sasaran, visi dan misi dari organisasi yang tertulis kedalam perencanaan strategi organisasi. Kinerja juga terkadang digunakan dalam menyebutkan pencapaian keberhasilan suatu individu atau kelompok organisasi. Kinerja dapat diperoleh apabila individu atau kelompok organisasi tersebut mempunyai nilai dalam keberhasilan yang telah tertulis dalam perencanaan strategi. Kriteria keberhasilan ini berisi mengenai tujuan, target atau bisa juga hasil tertentu yang ingin dicapai. Tolak ukur dalam keberhasilan kinerja tersebut tidak dapat diketahui atau ditentukan apabila tidak adanya tujuan atau target dari individu atau kelompok.

2.1.6.3 Peranan

Peranan memiliki arti sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat. Peran adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan. Menurut Soerjono Soekanto (1990: 243) peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Artinya adalah posisi yang dimiliki seseorang tersebut seperti Kepala Desa yang merupakan pemerintahan desa, dengan posisi tersebut pemerintah desa akan lebih memiliki

wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menurut Narwoko (2004: 160) fungsi peranan adalah sebagai Memberi arah pada proses sosialisasi, Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, normanorma dan pengetahuan, Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat, maupun dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat. Berdasarkan pelaksanaannya peranan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Peranan yang diharapkan (expected roles) ialah cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-secermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.

Peranan jenis ini antara lain peranan kepemimpinan. Sedangkan Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tersebut. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat (Hendropuspio, dalam Narwoko, 2007: 160). Fungsi dari peranan ialah a. Memberi arah pada proses sosialisasi (instruksi dan konsultasi) b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan (delgasi) c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat (partisipasi) d. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat (pengendalian).

2.1.6.4 Pemerintah Desa

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa disebutkan pemeritah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang publik . Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang di bangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, patisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintahan sehingga desa memilki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Unsur dari pemerintah desa ialah Kepala Desa. Perangkat Desa yang terdiri dari Sekertaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis perangkat desa serta bekerja sama dengan BPD untuk menyelenggarkan pemerintahan desa.

Kepala Desa merupakan pemimpin yang berada di pemerintahan desa dimana, dipilih langsung oleh penduduk desa berwarga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang

berdominan pada peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa.

Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa. Kepala Desa dalam menyelengarakan sarana prasarana umum desa juga harus mengikuti prosedur sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.144 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mana mengatakan bahwa pemerintah desa memiliki peran menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Pembangunan desa sebagaimana yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Dimana, masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada pemerintah desa dalam rangka mengkordinasikan pembangunan desa sebagaimana dimaksud.

Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, atau pihak ketiga. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan

pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota serta menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota; memberikan laporan keterangan penyelengaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran dan memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepadamasyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa memiliki peranan yang sangat besar dalam memajukan pembangunan untuk meningkatkan kehidupan rakyat desanya. Selaku pemimpin utama dan tertinggi kepadanya juga diberikan kuasa sebagai penanggung jawab utama seluruh kegiatan yang diselenggarakan. Sedangkan perangkat desa ialah terdiri dari Sekertaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah di konsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugasnya perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Desa dapat membentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Lembaga kemasyarakatan ini bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Sebagai perwujudan demokrasi sesuai dalam maka pemerintahan dalam tatanan pemerintah desa dibentuk badan pesmusyawaratan desa (BPD) atau sebutan lain yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai

lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembutan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

2.1.7 Konsep Partisipasi Masyarakat

2.1.7.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Posisi masyarakat sipil dalam perwujudan good governance adalah bagian yang cukup penting. Posisi masyarakat sama halnya seperti pemerintah maupun kelompok swasta. Ia memiliki peranan yang strategis dalam mewujudkan good governance. Peranan penting dari masyarakat ini diwujudkan melalui partisipasi. Dalam hal ini partisipasi yang dimaksudkan adalah keterlibatan masyarakat dalam berbagai proses dan tahapan pengambilan keputusan pemerintah/politik/negara. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan,baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka.

Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Dalam hal ini setiap masyarakat memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan. Peran serta dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan merupakan bagian dalam mewujudkan tujuan dari pembangunan itu sendiri yang berorientasi pada

kesejahteraan rakyat. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah maupun kalangan swasta semata. Partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan juga sangatlah diperlukan.

Karena masyarakat yang punya kehendak, punya suara dan mempunya sumberdaya. Inilah posisi tawar masyarakat sangat penting. Karenanya partisipasi masyarakat harus menjadi bagian yang utama dalam upaya mewujudkan good governance. Ini sebagai upaya percepatan untuk menjadikan masyarakat yang mandiri dan berdaya.

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya.

2.1.7.2 Dimensi dan Indikator Partisipasi Masyarakat

1) Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan

Partisipasi dalam perencanaan pembangunan merupakan suatu komponen yang sangat penting bagi keberhasilan proyek-proyek pembangunan. Partisipasi dalam perencanaan program-program pembangunan dapat mengembangkan kemandirian yang dibutuhkan oleh para anggota masyarakat pedesaan demi akselerasi pembangunan (Ndraha, 1994). Korten (1981) menyatakan bahwa masyarakat penerima program perlu dilibatkan dalam identifikasi masalah pembangunan dan dalam proses perencanaan program pembangunan (Supriatna, 2000). Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat perlu terlibat

atau dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan pembangunan sehingga pada tahapan selanjutnya diharapkan akan tetap ada partisipasi masyarakat.

Indikator dalam rangka mengukur dimensi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan khususnya dalam perencanaan program pembangunan dapat dilihat melalui 5 indikator sebagai berikut, 1) keterlibatan dalam rapat atau musyawarah, 2) kesediaan dalam memberikan data dan informasi, 3) keterlibatan dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan, 4) keterlibatan dalam penentuan skala prioritas kebutuhan dan 5) keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

2) Keterlibatan Masyarakat Dalam Pelaksanaan.

Mengenai partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, Cohen dan Uphoff (1977) menyatakan bahwa partisipasi dalam pembangunan meliputi 1) partisipasi dalam sumber daya, 2) partisipasi dalam administrasi dan koordinasi, dan 3) partisipasi dalam pendaftaran program. Dikemukakan lebih lanjut oleh Ndraha (1994) bahwa partisipasi dalam pelaksanaan meliputi 1) mengarahkan daya dan dana, 2) administrasi dan koordinasi, dan 3) penjabaran dalam program. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam rangka mengukur dimensi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ditetapkan 4 indikator meliputi, 1) keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, 2) kesediaan memberikan sumbangan berupa pikiran, keahlian dan keterampilan, 3) kesediaan memberikan sumbangan berupa uang, materi dan bahan-bahan, dan 4) tanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan.

3) Keterlibatan Dalam Penerimaan Dan Pemanfaatan Hasil.

Cohen dan Uphoff (1977) menyatakan bahwa partisipasi dalam penerimaan danpemanfaatan hasil pembangunan dapat dibedakan menjadi, pertama, manfaatmaterial seperti peningkatan pendapatan atau aset lain yang penting bagikepentingan pribadi. Kedua, manfaat sosial, pendidikan, kesehatan dan jasa-jasalain. Ketiga, manfaat individual seperti pengembangan diri, kekuasaan politik, dankepercayaan umum bahwa seseorang mulai dapat mengendalikan kuasanya.Keempat, konsekuensi yang diharapkan.

Ndraha (1989) menyatakan bahwapartisipasi dalam menerima hasil pembangunan berarti 1) menerima setiap hasilpembangunan seolah-olah milik sendiri, 2) menggunakan, memanfaatkan setiaphasil pembangunan, 3) mengusahakan (menjadikan suatu lapangan usaha danmengeksploitasikannya) misalnya pembangkit tenaga listrik, perusahaan desa dan sebagainya, 4) memelihara secara rutin dan sistematis, tidak dibiarkan rusak dengan anggapan bahwa kelak ada bantuan pemerintah untuk pembangunan baru,5) mengatur penggunaan dan pemanfaatannya, pengusahaan dan pengamanannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka indikator dari dimensi keterlibatan dalammenerima, memanfaatkan dan memelihara serta mengembangkan hasil-hasilpembangunan meliputi, 1) pemahaman tentang hakikat pembangunan, 2)kesediaan dalam menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan, 3) kesediaandalam melestarikan hasil-hasil pembangunan, 4) kesediaan dalammengembangkan hasil pembangunan.

4) Keterlibatan Dalam Pengawasan Dan Penilaian Hasil

Setiap usaha pembangunan yang dilaksanakan tentunya memerlukan suatu pengawasan sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan bila terjadi penyimpangan segera diperbaiki. Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan, Kartasasmita (1997) menyatakan bahwa "tanpa pengawasan dan pengendalian, apa yang direncanakan dan dilaksanakan dapat menuju ke arah yang bertentangan dengan tujuan yang telah digariskan". Hal ini menunjukan bahwa pengawasan masyarakat dalam pembangunan mutlak dilakukan sehingga selain apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, juga untuk menjamin agar hasil pembangunan, baik fisik maupun non fisik mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ndraha (1989) mengatakan bahwa agar pengawasan dapat berlangsung, diperlukan beberapa syarat atau kondisi, yaitu, 1) adanya norma, aturan dan standar yang jelas, 2) adanya usaha pemantauan kegiatan yang diatur dengan norma atau aturan tersebut, 3) adanya informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan tersedia pada waktunya, tentang kegiatan dan hasil kegiatan yang dimaksud, 4) adanya evaluasi kegiatan, yaitu sebagai pembanding antara norma dengan informasi, 5) adanya keputusan guna menetapkan hasil evalusasi tersebut, 6) adanya tindakan pelaksanaan keputusan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam rangka mengukur dimensi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan ditetapkan 7 indikator yang meliputi, 1) adanya norma atau aturan standar, 2) adanya kesempatan bagi

masyarakat untuk melakukan pengawasan, 3) keaktifan dalam melakukan pengawasan, 4) dampak pendapatan negara dan daerah, 5) dampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, 6) dampak terhadap pengembangan sektor lain, 7) pemberian saran dan kritik dari masyarakat.

2.1.8 Konsep Pembangunan Desa

2.1.8.1 Pengertian Pembangunan Desa

Menurut Siagian (1981:21) Indeks pembangunan desa merupakan suatu usah atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintahan dalam usah pembinaan bangsa.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam konsep pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni: harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahnya, dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai. Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan tersebut, bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam suasana kehidupan yang penuh harmonis.

Dalam buku Indeks Pembangunan Desa (Barokah, dkk. 2015), pembangunan perdesaan adalah konsep pembangunan yang berbasis perdesaan (rural) dengan memperhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal dikawasan perdesaan. Masyarakat perdesaan pada umumnya masih memiliki dan melestarikan kearifan lokal kawasan perdesaan yang terkait dengan

karakteristik sosial, budaya dan geografis, struktur demografi, serta kelembagaan desa.

Masyarakat pada umumnya masih menghadapi masalah kemiskinan, serta masih kurangnya ketersediaan dan akses terhadap infrastruktur pelayanan dasar. Pembangunan perdesaan dilaksanakan dalam rangka intervensi untuk mengurangi tingkat kesenjangan kemajuan antara wilayah perdesaan dan perkotaan sebagai akibat dari pembangunan ekonomi sebelumnya yang cenderung bias perkotaan (urban bias). Pembangunan perdesaan diharapkan menjadi solusi bagi perubahan sosial masyarakat desa, dan menjadikan desa sebagai basis perubahan.

2.1.8.2 Dimensi dan indikator pembangunan desa

Dalam buku Indeks Desa Membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Hamidi, dkk. 2015), dimensi dan indikator pembangunan desa adalah sebagai berikut.

1. Dimensi Sosial

   Dalam dimensi sosial, indikator yang digunakan adalah Kesehatan, Pendidikan, Modal sosial, dan Permukiman.

2. Dimensi Ketahanan Ekonomi

   Dalam dimensi ketahanan ekonomi, indikator yang digunakan adalah Keragaman produksi, Pusat pelayanan perdagangan, Akses distribusi, Akses lembaga keuangan, Lembaga ekonomi, dan Keterbukaan wilayah.

3. Dimensi Ekologi

Dalam dimensi ekologi, indikator yang digunakan adalah Kualitas lingkungan, dan Potensi/rawan bencana alam.

2.2 Penelitian Terdahulu

Lasa & Lestari (2018), meneliti mengenai "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa". Variable yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu Akuntabilitas dan Transparansi sebagai variable Independent dan Partisipasi Masyarakat sebagai variable dependen. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, populasi respondennya 13 orang. Teknik pengambilan sempel yang dipilih adalah sampel sederhana atau *simple random sampling* dengan metode angket atau koesioner tertutup dalam pengumpulan data. Data yang terkumpul di analisis dengan menggunakan teknik Uji Validasi dan Reliabilitas Instrumen, Uji Statistika, Uji Hipotesa, dan Uji Perhitungan prosentase hubungan antar variable. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Pengaruh yang dihasilkan bersifat positif.

Musriadi (2012), meneliti mengenai "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang". Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut Kepemimpinan Kepala Desa sebagai variabel Independent dan Partisipasi Masyarakat sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang. Populasi dalam penelitian ini berjumlah

325 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *sampling proportional random sampling* dengan proses pengumpulan data seperti observasi umum, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan Uji regresi linier sederhana. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Pengaruh yang dihasilkan bersifat positif.

Ratih & Chotimah (2017), meneliti mengenai "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Sako Makmur Kecamatan Sembawa kabupaten Banyuasin". Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut kepemimpinan kepala desa sebagai variabel Independent dan Partisipasi Masyarakat sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan di desa sako makmur kecamatan sembawa kabupaten banyuasin. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 264 orang dan ditentukan menggunakan strata yaitu tingkat pendidikan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *non proportionate stratified random sampling* sehingga populasi menjadi 44 orang. Proses pengumpulan data menggunakan metode angket dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan Uji Validitas dan Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Homogenitas, Uji Regresi Linier, dan Uji Hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat. Pengaruh yang dihasilkan bersifat poisitif.

Aisia, Galih (2015), meneliti mengenai "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Ditinjau dari Ekonomi Islam". Variable yang digunakan dalam penelitian tersebut Gaya Kepemimpinan Kepala Desa sebagai variable Independent dan Partisipasi Masyarakat sebagai variable dependen. Penelitian ini dilakukan di Desa Sri Pendowo dan Desa Tanjung Jaya kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. Populasi dalam penelitian ini 96 orang. Teknik yang digunakan dalam penlitian ini menggunakan teknik *probability sampling* denganproses pengumpulan data menggunakan koesioner (angket). Data yang terkumpul lalu dianalisis menggunakan Uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Pengaruh yang dihasilkan bersifat positif.

Sugista (2017), meneliti mengenai "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa". Variabel yang digunakan adalah Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat sebagai variable Independent dan Pembangunan Desa sebagai variable dependen. Penelitian ini dilakukan di desa Kabupaten Lampung Selatan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 400 responden. Teknik yang digunakan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan proses pengumpulan data menggunakan koesioner. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan Uji regresi berganda dan Uji Validitas dan reabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyrakat berpengaruh positif terhadap pembangunan desa.

Akbar (2017), meneliti tentang "Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun 2017". Variabel yang digunakan Kepemimpinan Kepala Desa sebagai variable Independent dan Pasrtisipasi Masyrakat variable dependen. Penelitian ini dilakukan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 87 responden. Teknik yang digunakan menggunakan teknik *random sampling* dengann proses pengumpulan data menggunakan koesioner. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan Uji Koefisien korelasi. Hasil penelitian ini menunjukkan kepemimpinan kepala desa mempunyai pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan walaupun korelasinya (hubungannya) tidak tinggi atau rendah, tetapi hubungannya signifikan.

Justita Dura (2016), meneliti tentang "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Keuangan Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)". Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa keuangan desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Terdapat juga pengaruh secara bersama-sama (simultan) antara ketiga variable tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kartika (2018), melakukan penelitian yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pemecutan Kaja". Menemukan bahwa pengelolaan Dana Desa tahun 2016 di desa Pemecutan Kaja kurang akuntabel. Hal ini dilihat dari tiga indikator akuntabilitas keuangan yang digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas, dan prinsip value of money belum terpenuhi dalam pelaksanaan Dana Desa tahun 2016 di desa Pemecutan Kaja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas desa berpengaruh negatif terhadap pembangunan desa.

Astri, Furqani (2010), meneliti tentang "Manajemen Keuangan dari Desa Kalimo Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep". Menyatakan bahwa prinsip transparansi hanya terlihat pada saat perencanaan pembangunan desa. Sedangkan semua proses tidak memenuhi prinsip pertanggungjawaban yang digariskan dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu, prinsip akuntabilitas sangat rendah karena tidak melibatkan masyarakat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam pertanggungjawaban keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas desa berpengaruh negatif terhadap pembangunan desa.

Aprisiami Putriyanti (2012), meneliti tentang "Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Aglik, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo)". Hasil penelitian ditemukan bahwa penguatan akuntabilitas Pemerintahan Desa Aglik rendah, karena kurangnya respon masyarakat terhadap informasi Laporan Penyelenggaraan Desa serta kurangnya pengawasan terhadap pertanggungjawaban pemerintah desa.Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas desa berpengaruh negatif terhadap pembangunan desa.

2.3 Kerangka Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

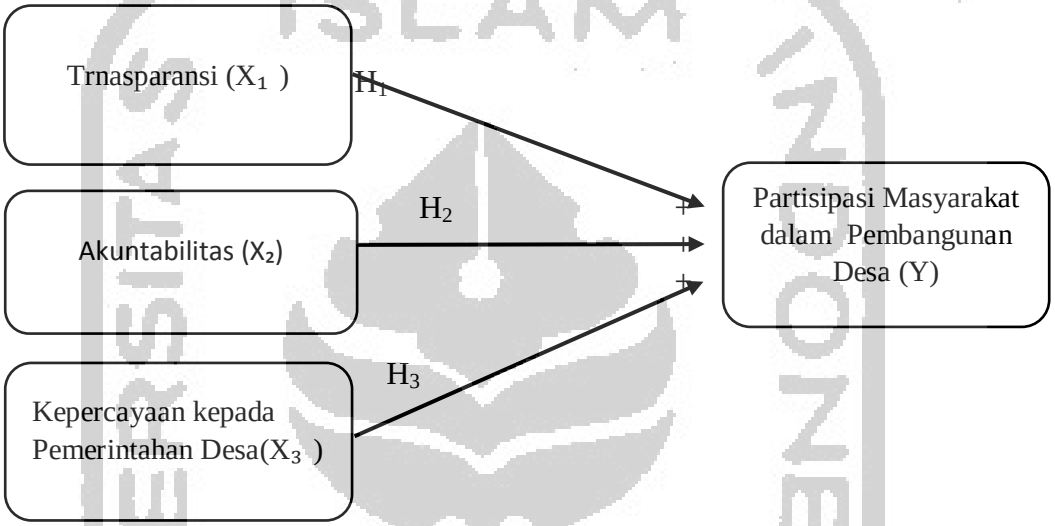

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Transparansi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Transparansi pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan uang yang ada tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, serta dilakukan sesuai dengan kaidah hukum dan aturan yang berlaku. Dengan adanya transparansi ini, diharapkan keuangan desa dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Prinsip transparansi ini penting supaya keuangan desa dapat memenuhi hak-hak masyarakat dan untuk menghindari konflik di masyarakat desa.

Dengan adanya transparansi dan keterbukaan tentang pengelolaan dan informasi mengenai keuangan desa, pemerintah dan aparat desa akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik. Selain itu juga, dengan adanya keterbukaan informasi maka akan memudahkan kontrol sosial dari masyarakat itu sendiri. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat didasarkan atas pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh dan terbuka mengenai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan yang dipercayakan kepadanya.

Lasa & Lestari (2018), meneliti mengenai Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa. Pada penelitiannya membuktikkan bahwa Transparansi berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangannya, diantaranya prinsip tersebut dilaksanakan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat setiap pencairan dana dari pendapatan transfer, pemasangan baliho tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LPJRAPBDesa).

Sugista (2017), meneliti mengenai Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa. Pada penelitiannya membuktikkan bahwa Transparansi berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat. Dengan demikian, semakin tinggi transparansi pengelolaan keuangan desa maka akan meningkatkan

pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Sebagaimana penjelasan di atas diduga terdapat hubungan positif antara transparansi dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan demikian, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Terdapat pengaruh positif antara Transparansi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.

2.4.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Akuntabilitas atau bentuk pertanggungjawaban adalah sebuah bentuk keharusan yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa yang menjadi pelaku administrasi pembangunan sekaligus pengelola keuangan terhadap masyarakat yang menjadi penerima manfaat atau kelompok sasaran. Prinsip akutabilitas ini memiliki pengertian bahwa kinerja dan tindakan pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, setiap pelaksanaan kegiataan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Berdasarkan prinsip ini, pemerintah dan aparat desa harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelakasanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah diatasnya sesuai dengan perundang-undangan. Prinsip akuntabilitas ini perlu dilakukan untuk memenuhi kepuasaan masyarakat, maka dari itu diperlukan pihak pemegang yang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan dan

memberikan laporan terkait keuangan desa kepada kelompok sasaran dalam hal ini yaitu masyarakat.

Lasa &Larasati (2018), meneliti mengenai Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa. Pada penelitiannya membuktikkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat. Sikap Akuntabilitas sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam mengimplementasikan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan melibatkan masyarakat desa secara keseluruhan agar dapat menjamin pengelolaan ADD dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Sugista (2017), meneliti mengenai Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa. Pada penelitiannya membuktikkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat. Dengan demikian, semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa maka akan meningkatkan pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Sebagaimana penjelasan di atas diduga terdapat hubungan positif antara akuntabilitas dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan demikian, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H2 : Terdapat pengaruh positif antara Akuntabilitas terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.

2.4.3 Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintahan Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Kepercayaan merupakan suatu hasil dari pencapaian suatu akibat yang diharapkan dari keberhasilan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan dalam mencapai misinya. Untuk organisasi atau lembaga pemerintahan pelayana publik, informasi kepercayaan tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Dengan melakukan penilaian terhadap kepercayaan, maka upaya untuk memperbaiki kerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis agar kepercayaan dan pembangunan yang diharapkan dapat berjalanan dengan baik.

"Kinerja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi, efesiensi, efektifitas, dan persamaan pelayanan"(Salim & Woodward, 1992:52). Berdasarkan pengertian kinerja yang dikemukakan oleh Salim dan Woodward, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kinerja yang baik adalah kinerja yang didalamnya memiliki pertimbangan-pertimbangan ekonomi, efesiensi, efektifitas dan persamaan pelayanan.

Kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikaor kinerja organisasi publik. Keuntungan menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media masa atau diskusi publik. Akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi

publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

Pratama (2014) meneliti mengenai kinerja pemerintahan desa dalam pembangunan fisik pedesaan (Studi di Desa Parijatahwetan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi). Pada penelitiannya membuktikkan bahwa Kinerja Pemerintahan Desa berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa. Dengan demikian, Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berupa pembangunan fisik adalah kewajiban pemerintah desa. Diperlukan kinerja yang baik dan berkualitas dari pemerintah desa agar mampu mewujudkan segala kebutuhan masyarakat desa yang berupa pembangunan fisik sebagai penunjang akses kegiatan perekonomian masyarakat desa.

Sebagaimana penjelasan di atas diduga terdapat hubungan positif antara kepercayaan yang dihasilkan karena kinerjayang dilakukan pemerintahan desa dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan demikian, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H3 : Terdapat pengaruh positif antara Kepercayaan kepada Pemerintahan Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menggunakan analisis regresi berganda. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah regresi linear berganda dengan serangkaian uji instrumen dan uji asumsi klasik.

Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2011:7), adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.MenurutBurns dan Bush (dalam Mangkunegara, 2011) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan struktur pertanyaan yang pilihan jawabannya telah disediakan.

Menurut Sugiyono (2011:6) metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu secara alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, seperti dengan menggunakan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya.

Dalam penelitian ini penelusuran Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan kepada Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa didapatkan dengan menggunakan metode survey, dimana menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang digunakan hanya pada desa Balapulang WetanDengan melakukan penyebaran kuesioner pada responden (masyarakat) di desa Balapulang Wetan, untuk mendeteksi seberapa besar pengaruh dari Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan kepada Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah total dari seluruh elemen atau orang dengan karakteristik yang sama yang merupakan pusat perhatian peneliti, karena dianggap sebagai pusat penelitian (Ferdinand, 2006). Menurut Sujarweni dan Endrayanto (2012:13) populasi adalah suatu wilayah yang di generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang telah di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik pada populasi yang menjadi pusat perhatian peneliti (Sugiyono, 2011:81).Dapat disimpulkan sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang karakteristiknya telah ditetapkan oleh peneliti yang akan diselidiki untuk mewakili dari keseluruhan populasi yang jumlahnya lebih sedikit dari populasi.

Jumlah Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga di desa Balapulang Wetan. Dalam penelitian ini penulis mempersempit populasi dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh penulis. Kriteria yang ditetapkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- Merupakan seorang kepala keluarga
- Berumur 30-60 tahun dan bekerja
- Minimal pendidikan adalah SMA
- Aktif dilingkungan masyarakat
- Menetap di desa tersebut lebih dari 3 periode pergantian jabatan pemerintah desa

Alasan lebih memilih responden laki-laki karena melihat hasil penelitian yang dilakukan (Alberth & Far, 2012) menunjukkan bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah perbedaan gender mengakibatkan tersosialisasinya citra posisi, kodrat dan penerimaan nasib perempuan dan selanjutnya manifestasi ketidakadilan gender merupakan proses penjinakan peran perempuan. Sehingga perempuan sendiri juga menganggap bahwa posisi dan kondisi yang ada sekarang sebagai sesuatu yang normal dan kodrati.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh penulis, didapatlah jumlah responden sebanyak 108 orang dalam penelitian ini. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana peneliti memberikan kriteria khusus bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel.

3.4 Data dan Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang harus di olah sehingga dapat menjadi informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta (Siregar, 2013).

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber pertama atau objek penelitian dilakukan yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Siregar, 2013).Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari penyebaran kuesioner yang telah dibagikan kepada 108Masyarakat yang ada di desa Balapulang Wetan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya (Siregar, 2013).Dalam penelitian inidata sekunder yang digunakan adalah buku-buku, artikel, jurnal, skripsi terdahulu dan situs di internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2011:137), ada berbagai macam setting, sumber dan cara dalam pengumpulan data. Bila menggunakan setting, data dapat diperoleh pada setting alamiah. Bila menggunakan sumber data, data dapat diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Bila menggunakan cara atau teknik dalam pengumpulan data, data dapat diperoleh dengan melakukan wawancara, penyebaran kuesioner, obervasi, ataupun gabungan dari ketiga cara atau teknik tersebut. Metode dalam memperoleh data pada penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner.

Kuesioner adalah teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi sejumlahpertanyaan kepada responden untuk memperoleh jawaban

(Sugiyono, 2011). Mengelompokkan pertanyaan berdasarkan variabelnya dengan mengirimkan pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden, dilakukan dengan melakukan penyebaran form kuesioner yang berisi pertanyaan meliputi Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan kepada Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Penggunaan kuesioner bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta mendukung penelitian.

Pada penelitian ini menggunakan kuesioner dengan model Skala Likert. Sugiyono (2011:93) menjelaskan bahwa Skala Likert digunakan untuk mengungkap sikap, pendapat, dan presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Dalam Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Untuk mengukur variabel diatas digunakan Skala Likert sebanyak lima tingkat sebagai berikut:

a. Sangat Setuju (SS)
b. Setuju (S)
c. Tidak Setuju (TS)
d. Sangat Tidak Setuju (STS)

Setiap poin jawaban memiliki skor yang berbeda, yaitu: untuk jawaban SS memiliki nilai 4, jawaban S memiliki nilai 3, jawaban TS memiliki nilai2, dan jawaban STS memiliki nilai 1. Peneliti menggunakan metode ini agar dapat

mengetahui dan memiliki data mengenai penilaian dari setiap karyawan sehingga bias ditarik kesimpulan.

3.6 Variabel Penelitian

Variabel penelitan adalah suatu atribut atau sifat, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variable terikat.

1. Variabel terikat (*Dependent Variabel*)

   Variabel dependen adalah variabel yang dapat dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Partisipasi Masyarakat (Y).

2. Variabel bebas (*Independent Variabel*)

   Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi dan yang menjadi penyebab munculnya variabel dependen (Sugiyono, 2011).

   Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen yang terdiri dari:

   a. Transparansi
   b. Akuntabilitas
   c. Kepercayaan kepada Pemerintah Desa

3.7 Definisi Operasional Variabel

Menurut Hatch dan Farhady (1981) yang dikutip oleh Sugiyono (2008) dalam Wiyono (2011:30), variabel didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau obyek yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu

obyek yang satu dengan lainnya. Variabel juga dapat merupakan atribut dari bidang keilmuan atau suatu kegiatan tertentu. Menurut Sekaran (2003) variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk obyek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk obyek atau orang yang berbeda. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan meliputi variabel independen (variabel bebas) dengan variabel dependen (variabel terikat) diantaranya:

3.7.1 Variabel Independen (X)

Variabel Independen menurut Wiyono (2011:31) adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab terjadinya perubahan terhadap variabel dependen. Variabel ini sering juga disebut dengan variabel stimulus, predictor, antecedent, atau disebut juga variabel bebas. Masing-masing variabel penelitian sebagai berikut:

1) Transparansi (X1)

   Merupakan proses yang dipengaruhi oleh seseorang untuk memberikan keyakinan dalam mencapai efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan, dan keandalan laporan keuangan, serta kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya.

2) Akuntabilitas (X2)

   Merupakan Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya.

3) Kepercayaan kepada Pemerintah Desa (X3)

Kepercayaan sering diartikan sebagai suatu kondisi dimana warga dapat menyerahkan nasibnya kepada pemerintah dan para pejabat publik karena dianggap akan selalu mengurus kepentingan warga secara baik

Dalam melakukan sebuah penelitian pasti memerlukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi suatu variabel, untuk itu diperlukan penyusunan konstruk agar lebih memudahkan melakukan penelitian. Kuesioner yang diperlukan dalam meneliti ini di ambil dari kuesioner (Ikhwandha, 2018) yang telah di modifikasi untuk mengetahui Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan kepada Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Item Pernyataan VariabelTransparansi (X1)

Kuesioner: Transparansi Pengelolaan Dana Desa					
A.	**Transparansi**	**STS**	**TS**	**S**	**SS**
1.	Laporan keuangan Pemerintah Desa diterbitkan secara periodik.				
2.	Laporan keuangan dan pemaparan program Pemerintah Desa mudah diakses oleh publik secara bebas.				
3.	Pemerintah Desa memaparkan segala aktivitas pengelolaan dana desa kepada masyarakat.				
4.	Pemerintah Desa mempublikasikan laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan.				
5.	Pemerintah Desa mengungkapkan kondisi keuangan secara menyeluruh kepada pihak				

	yang berkepentingan.				
6.	Pemerintah Desa mencantumkan kebijakannya secara tertulis dan mengungkapkannya kepada pihak yang berkepentingan.				
7.	Kebijakan Pemerintah Desa yang berhubungan dengan dana desa dipahami oleh masyarakat.				

Tabel 3.2 Item Pernyataan Variabel Akuntabilitas (X2)

Kuesioner: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa					
B. Akuntabilitas		**STS**	**TS**	**S**	**SS**
8.	Penyaluran dana desa dilakukan dengan melihat kebutuhan masyarakat				
9.	Program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.				
10.	Setiap anggota masyarakat menerima manfaat dana desa secara adil.				
11.	Setiap anggota masyarakat mendapat perlakuan yang adil dari pemerintah desa.				
12.	Program penyaluran dana desa yang dilakukan tidak merusak stabilitas lingkungan				

Tabel 3.3 Item Pernyataan Variabel Kepercayaan kepada Pemerintah Desa (X3)

Kuesioner: Kepercayaan kepada Pemerintah Desa					
C. AFFECTIVE-BASED TRUST		**STS**	**TS**	**S**	**SS**
14.	Saya mempunyai kebebasan untuk memberikan ide dan pemikiran saya kepada Pemerintah Desa				

15.	Pemerintah Desa akan membantu kesulitan yang saya hadapi saat saya berpartisipasi dalam program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.				
16.	Jika saya menyampaikan masalah atas program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, saya memperoleh tanggapan secara baik				
19.	Antara saya dengan Pemerintah Desa mempunyai kedekatan emosi.				
D. COGNITIF-BASED TRUST		**STS**	**TS**	**S**	**SS**
19.	Aparat Pemerintah Desa bekerja secara profesional dan penuh dedikasi				
20.	Saya tidak melihat alasan untuk meragukan kompetensi dan kemampuan aparat Pemerintah Desa dalam menjalankan pekerjaannya				
21.	Saya bisa mengandalkan Pemerintah Desa untuk mengelola dana desa.				
22.	Menurut saya, apparat Pemerintah Desa bisa dipercaya dan dihormati oleh berbagai pihak yang berkepentingan				
23.	Orang-orang yang saya kenal beranggapan bahwa apparat Pemerintah Desa dapat dipercaya				
24.	Jika orang tahu lebih banyak tentang apparat Pemerintah Desa, mereka akan tertarik untuk bekerja sama dengannya				

3.7.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen (Y) pada penelitian ini yaitu variabel Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Variabel Dependen merupakan variabel yang tidak dapat berdiri sendiri (variabel terikat) yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen.

Tabel 3.4 Item Pernyataan Variabel Partisipasi Masyarakat (Y)

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa					
E. Partisipasi Masyarakat		**STS**	**TS**	**S**	**SS**
25.	Saya sadar bahwa partisispasi saya sangatdibutuhkan untuk kemajuan desa				
26.	Saya menyadari peran dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sangat berharga untuk pembangunan desa				
27.	Saya aktif dalam kegiatan apapun yang terkait pembangunan yang ada di desa				
28.	Saya peduli dengan kegiatan pemerintah yang ada di desa				
29.	Tidak ada paksaan untuk selalu aktif dalam kegiatan di desa, yang artinya ada kebebasan untuk selalu mendukug dan aktif dalam kegiatan di desa				
30.	Saya aktif dalam menyampaikan kritik dan saran pada kegiatan yang dilaksanakan di desa				

3.8 Metode Analisis Data

Analisis didasarkan pada data-data yang diperoleh dari sumber intern perusahaan dan hasil kuesioner yang disebarkan.Prosedur yang dilakukan adalah menilai hasil kuesioner dan mengolanya dengan metode statistik SPSS.

3.8.1 Mengolah Hasil Kuesioner

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu melakukan koreksi atas jawaban-jawaban responden dengan jalan meluruskan maksud jawaban yang diberikan jika ternyata terdapat kesalahan penafsiran terutama dalam pengisian data responden.
2. *Coding and scoring*, proses ini memberikan kode atas masing-masing jawaban responden dalam kuesioner untuk diberi skor.
3. *Tabulation*, tabulasi dilakukan setelah selesai memberikan skor dan menetukan kategori skor jawaban responden, yakni menyusun skor jawaban-jawaban responden dimaksud dalam tabel sesuai dengan kebutuhan analisa.

Untuk mengolah hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden digunakan scoring dengan skala likert. Setelah diisi oleh responden, akan diberi nilai sesuai dengan jawaban masing-masing responden yang dimaksudkan dalam kategori, untuk selanjutnya diolah dalam program SPSS (*Statistical Program For Social Science*).

3.8.2 Uji Instrumen

Uji instrumen ini akandilakukan kepada 108responden yaituMasyarakat yang ada di desa Balapulang Wetan. Dilakukannya uji instrumen bertujuan untuk menghindari bias apabila dilakukan penelitian.

3.8.2.1 Uji Validitas

Kuesioner harus di ukur sah atau validnya terlebih dahulu sebelum data dapat digunakan. Untuk mengukur validnya kuesioner menggunakan uji validitas. Kuesioner dinyatakan sah atau valid jika setiap pertanyaan pada kuesioner dapat mengungkapan suatu hal yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. (Ghozali, 2012). Uji signifikansi dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df)= n-2, n adalah jumlah sampel dan alpha sebesar 5% atau 0.05. Jika hasil r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif, maka butir atau pertanyaan tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2012).

Pada penelitian ini validitas item diukur dengan korelasi Pearson product moment yaitu korelasi item dengan total item. Menurut Sunyoto (2009: 72)menyatakan bahwa apabila nilai signifikansi korelasi pearson lebih kecil dari 0,05 (5%) maka item tersebut valid secara statistik.

3.8.2.2 Uji Reliabilitas

Kuesioner yang dinyatakan valid harus lulus uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah kuesioner dapat di andalkan atau tidak. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2012).

Dalam mengukur konsistensi alat ukur (kuesioner) penelitian ini digunakan teknik analisis dengan formula Cronbach Alpha melalui bantuan program komputer SPSS. Dengan asumsi semakin kecil kesalahan pengukuran, makin reliabel alat pengukur, sebaliknya makin besar kesalahan pengukuran, maka makin tidak reliabel alat pengukur tersebut. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,6 (Nunnally dalam Ghozali, 2012).

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

3.8.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Menurut Ghozali (2012) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk melakukan uji normalitas yaitu Dengan menggunakan uji statistik non parameterik Kolmogorov-Smirnov untuk melakukan pengujian terhadap normalitas data dengan menggunakan program komputer *Statistical Program For Social Science* (SPSS). Kriteria dalam pengambilan keputusan pada uji statistik non parameterik Kolmogorov- Smirnov yaitu:

1) Jika angka signifikansi (SIG) < 0,05, maka data tidak berdistribusi normal;

2) Jika angka signifikansi (SIG) > 0,05, maka data berdistribusi normal.

3.8.3.2 Uji Multikoliniearitas

Uji multikoliniearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Seharusnya tidak ditemukan korelasi atara variabel independen dalam model regresi yang baik (Ghozali, 2012). Dalam mendeteksi multikolinearitas di dalam model regresi dilihat dari nilai tolerance dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai yang disyaratkan bagi nilai toleransi adalah lebih besar dari 0,01 dan untuk nilai VIF kurang dari 10 (Ghozali, 2006).

3.8.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2012). Cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik scaterplot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Selain diukur menggunakan grafik Scaterplot, heteroskedastisitas dapat diukur dengan cara yang secara sistematis yaitu dengan menggunakan uji Glesjer. Jika variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Jika probabilitas signifikansinya di atas 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

3.8.4 Analisis Statistik/Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi linear berganda meliputi 3 variabel independen yaitu

Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan kepada Pemerintah Desa. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, maka diperoleh hasil analisis regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + e$$

Keterangan:

Y = Partisipasi Masyarakat

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X1 = Transparansi

X2 = Akuntabilitas

X3 = Kepercayaan kepada Pemerintah Desa

e = error

3.8.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Determinasi ini dilakukan untuk melihat dan mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen X Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), dan Kepercayaan kepada Pemerintah Desa (X3) terhadap variabel dependen Y yaitu Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Y). Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2011) dalam Sihombing (2014). Nilai koefisiensi determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

3.8.6 Uji Hipotesis

Uji t

Uji t digunakan utnuk melihat signifikansi hubungan antara variabel X dengan variabel Y secara parsial. Uji-T ini digunakan untuk melihat seberapa berpengaruhnya variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Kriteria dalam pengambilan keputusan dalam uji T ini adalah membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai T hitung lebih tinggi dari T tabel, maka hipotesis alternatif diterima yang menyatakan bahwa variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2012:98). Parasmita (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Regresi linear berganda ini digunakan untuk menjawab hipotesis-hipotesis yaitu yang pertama membuat garis regresi linear sederhana serta menguji signifikansi dengan uji t.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji T:

- Jika nilai sig < 0.05, atau T hitung > T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y
- Jika nilai sig > 0.05, atau T hitung < T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian dan Hasil Data Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Balapulang Wetan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Masyarakat Balapulang Wetan memiliki penduduk yang berasal dari etnis yang berbeda, ada yang berasal dari suku Jawa, Keturunan Arab, Tionghoa, Campuran antara suku Jawa dan Belanda, dan lain sebagainya.. Desa Balapulang wetan ini memiliki luas 217.82 m^2 dengan jumlah penduduk sebanyak 16.677 Jiwa dan 4.787 Kepala Keluarga. Kehidupan sosial di daerah ini sangat terjaga dan rukun. Rata-rata bermayoritas beragama Islam, namun ada juga penduduk yang beragama Protestan, Katolik atau Hindu.Untuk bahasa kesehariannya, masyarakat Balapulang wetan menggunakan bahasa yang di campur dengan bahasa ngapakdan Bahasa Indonesia.

Masyarakat Balapulang wetan tidak jauh berbeda dengan desa lain yang ada di kecamatan Balapulang, ada yang berprofesi sebagai petani, peternak, pengolah kayu, berdagang, guru, tentara, polisi, atau jasa transportasi, masyarakat sebagian juga ada yang merantau ke luar kota.

Masyarakat yang merantau keluar kota biasanya masyarakat yang berprofesi sebagai pengolah kayu, dengan melambungnya harga kayu jati sebagai bahan mentah untuk furniture banyak home industri di bidang ini yang mati suri, karena harga jual produk tidak dapat menutup biaya produksi. Sehinggan banyak warga yang berprofesi dibidang ini pergi merantau kedaerah lain seperti Jakarta,

Bandung dan lain lain. Penggerak roda ekonomi lainnya adalah perdagangan di pasar tradisional yang cukup ramai terutama pada jelang-jelang hari besar. Di Balapulang ada bangunan yang berfungsi sebagai gedung peternakan burung walet yang menghasilkan sarang walet yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Sarang walet tersebut adalah air liur burung walet yang setelah dibersihkan dapat diolah menjadi sup sarang burung yang enak dan mahal serta menjadi hidangan yang eksotik. Menu makanan ini sangat disukai oleh masyarat keturunan Tionghoa baik di dalam maupun di luar negeri.

4.1.2 Hasil Data Objek Penelitian

Tabel 4.1

Tabel Responden

No.	Tanggal	Objek Penelitian	Jumlah Responden
1.	09-08-2019	Panitia Qurban Idhul Adha	26 Orang
2.	14-08-2019	Panitia Karnaval Desa Balapulang	21 Orang
3.	16-08-2019	Tasyakuran 17 Agustusan	19 Orang
4.	17-08-2019	Panitia Lomba Agustusan RW 01	8 Orang
5.	18-08-2019	Panitia Lomba Agustusan RW 03	7 Orang
6.	22-08-2019	Panitia Gerak Jalan Santai di Kelurahan Balapulang	14 Orang
7.	24-08-2019 s/d 26-08-2019	Pintu ke Pintu di RT 01-04	13 Orang
Jumlah			108 Orang

4.2 Analisis Data Deskriptif

4.2.1 Hasil Penyebaran Kuesioner

Penulis dalam penelitian kuantitatif ini melakukan tahap penyebaran kuesioner dengan mendatangi rumah warga di desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal dan memberikan 1 (satu) kuesioner pada tiap-tiap rumah warga. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan 108 Kepala Keluarga yang ada di desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal sebagai sampel karena telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh penulis. Peneliti menyebarkan kuesioner yang berjumlah 108 dan kembali sebanyak 108 kuesioner.

Tabel 4.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Total_Transparansi	180	7	21	28	2682	24.83	1.897
Total_Akuntabilitas	108	5	15	20	1964	18.19	1.523
Total_Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa	108	10	30	40	3832	35.48	2.681
Total_Partisipasi Masyarakat	108	6	18	24	2308	21.37	1.700
Valid N (listwise)	108						

Hasil dari tabel 4.2 diketahui bahwa jumlah responden (N) sebanyak 108 responden dari masyarakat Balapulang Wetabn. Tabel 4.2 memiliki keterangan sebagai berikut :

1. Nilai *range* untuk membaca selisih dari nilai *maximum* dan nilai *minimum.*
2. Nilai *minimum* untuk membaca nilai terkecil dari jawaban para responden.
3. Nilai *maximum* untuk membaca nilai terbesar dari jawaban para responden.

4. Nilai *sum* untuk membaca nilai keseluruhan atau total dari jawaban responden.

5. Nilai *mean* untuk membaca nilai rata – rata dari jawaban para responden.

6. Nilai standar deviasi untuk membandingkan nilai deviasi dengan nilai mean, data dikatakan baik apabila nilai mean lebih besar dari nilai deviasi.

4.2.2 Pengujian Instrumen Penelitian

Sebelum melakukan pengujian hipotesis instrumen penelitian, terlebih dahulu penulis melakukan uji kualitas data, yaitu uji validitas dan reliabilitas

4.2.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk melihat valid atau tidaknya suatu instrument penelitian yaitu variabel independen Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan kepada Pemerintah Desa Terhadap variabel dependen Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Balapulang Wetan. Instrument penelitian dikatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabel.

R Tabel yang diperoleh dari n-2 adalah 108-2 = 106, maka R tabelnya berdasarkan distribusi nilai Rtabel dengan signifikansi 5% adalah 0.1891. Adapaun hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.2 – 4.5 berikut :

Tabel 4.3
Tabel Uji Validitas Variabel Transparansi

Item Pertanyaan	*Pearson Correlations*	Keterangan
1	0.541	Valid
2	0.630	Valid
3	0.556	Valid

4	0.615	Valid
5	0.677	Valid
6	0.616	Valid
7	0.532	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa pada variabel Transparansi yang memiliki 7 item pertanyaan dan seluruh item dari variabel Transparansi (X1) valid dikarenakan R hitung > R tabel dengan menggunakan 108 sampel responden.

Tabel 4.4
Tabel Uji Validitas Variabel Akuntabilitas

Item Pertanyaan	*Pearson Correlations*	Keterangan
1	0.748	Valid
2	0.665	Valid
3	0.735	Valid
4	0.567	Valid
5	0.671	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa pada variabel Akuntabilitas yang memiliki 10 item pertanyaan dan seluruh item dari variabel Akuntabilitas (X2) valid dikarenakan R hitung > R tabel dengan menggunakan 108 sampel responden.

Tabel 4.5
Tabel Uji Validitas Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa

Item Pertanyaan	*Pearson Correlations*	Keterangan
1	0.569	Valid
2	0.637	Valid
3	0.528	Valid
4	0.641	Valid
5	0.514	Valid
6	0.523	Valid
7	0.545	Valid
8	0.664	Valid
9	0.609	Valid
10	0.670	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa pada variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa yang memiliki 10 item pertanyaan dan seluruh item dari variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa (X3) valid dikarenakan R hitung > R tabel dengan menggunakan 108 sampel responden.

Tabel 4.6
Tabel Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Item Pertanyaan	*Pearson Correlations*	Keterangan
1	0.562	Valid
2	0.587	Valid
3	0.589	Valid
4	0.678	Valid
5	0.692	Valid
6	0.671	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa pada variabel Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa yang memiliki 6 item pertanyaan dan seluruh item dari variabel Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Y) valid dikarenakan R hitung > R tabel dengan menggunakan 108 sampel responden.

4.2.2.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2012:47), reliabilitas merupakan sebuah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kuesioner dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha > 0.60 dan dikatakan tidak reliabel jika nilai Cronbach's Alpha < 0.60. Alat ukur berupa kuesioner harus

lulus uji reliabilitas agar bisa digunakan dalam melakukan penelitian. Adapun hasil dari uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.7 – 4.10 berikut :

Tabel 4.7
Tabel Reliabilitas Variabel Transparansi (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.690	7

Sumber : Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan pada tabel 4.7 di atas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha pada variabel Transparansi (X1) sebesar 0.690 yang mana nilai tersebut menunjukkan bahwa 0.690 > 0.60, sehingga variabel Transparansi (X1) dinyatakan reliabel.

Tabel 4.8
Tabel Reliabilitas Variabel Akuntabilitas (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.702	5

Sumber : Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan pada tabel 4.8 di atas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha pada variabel Akuntabilitas (X2) sebesar 0.702 yang mana nilai tersebut menunjukkan bahwa 0.702 > 0.60, sehingga variabel Akuntabilitas (X2) dinyatakan Reliabel.

Tabel 4.9
Tabel Reliabilitas Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.787	10

Sumber : Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan pada tabel 4.9 di atas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha pada variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa (X3) sebesar 0.787 yang mana nilai tersebut menunjukkan bahwa 0.787 > 0.60, sehingga variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa (X3) dinyatakan Reliabel.

Tabel 4.10
Tabel Reliabilitas Variabel Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.694	6

Sumber : Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan pada tabel 4.10 di atas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha pada variabel Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Y) sebesar 0.694 yang mana nilai tersebut menunjukkan bahwa 0.694 > 0.60, sehingga variabel Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Y) dinyatakan Reliabel.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Normalitas

Menurut Wiyono (2011:149), uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Dalam melakukan uji normalitas ini akan digunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan

menggunakan taraf signifikansi 0.05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0.05 atau 5%. Menurut Ghozali (2012:160) uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah variabel dependen (terikat) dan variabel independen(bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Berdasarkan hasil yang pengujian terhadap data yang diperoleh, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.11

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		108
Normal Parameters[a]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.40593805
Most Extreme Differences	Absolute	.123
	Positive	.115
	Negative	-.123
Kolmogorov-Smirnov Z		1.279
Asymp. Sig. (2-tailed)		.076

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel 4.11 didapatkan data bahwa nilai signifikansi sebesar 0.076 yang mana nilai 0.076 > 0.05. Hal ini dapat diartikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal.

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi atau keterkaitan antar variabel penelitian. Untuk melanjutkan penelitan maka diharuskan untuk lolos dari Uji Multikolinearitas sebagai prasyarat utama. Pada uji multikolinearitas ini dilihat dari nilai VIF (*Varian Inflation Factor*) pada

model regresi *Tolerance*. *Tolerance* mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah, maka nilai VIF akan menjadi tinggi. Nilai yang disyaratkan bagi nilai toleransi adalah lebih besar dari 0,1 dan untuk nilai VIF kurang dari 10 (Ghozali, 2006).

Berdasarkan hasil pengujian terhadap data yang diperoleh, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.12

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.634	.544		-1.164	.247		
	TOTAL_X1	.508	.052	.567	9.821	.000	.165	6.067
	TOTAL_X2	.298	.059	.267	5.090	.000	.199	5.014
	TOTAL_X3	.112	.031	.177	3.623	.000	.230	4.351

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.12 di atas, maka dapat diketahui untuk nilai VIF dan *Tolerance* untuk masing-masing variabel penelitian. Nilai VIF untuk masing- masing variabel bebas yaitu Transparansi adalah sebesar 6.067, Akuntabilitas sebesar 5.014, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa sebesar 4.351 dan menunjukkan bahwa nilainya <10, sedangkan untuk nilai Tolerance >0.1 . Dengan hasil pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan gejala multikolinearitas.

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan variabel dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada data penelitian maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji Glejser dengan melihat nilai signifikansi. Berikut hasil pengujian terhadap data yang diperoleh, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.13

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.910	.372		2.443	.016
	TOTAL_X1	-.017	.035	-.114	-.483	.630
	TOTAL_X2	.053	.040	.285	1.329	.187
	TOTAL_X3	-.033	.021	-.309	-1.549	.124

a. Dependent Variable: Res2

Sumber : Data Primer diolah, 2019

Menurut Ghozali (2011:142-143) ditetapkan nilai alpha sebesar 0.05 atau 5%,. Dari tabel 4.13 di atas, nilai signifikansi yang di dapat pada variabel Transparansi sebesar 0.630, Akuntabilitas sebesar 0.187, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa sebesar 0.124 yang menunjukkan bahwa semua nilai signifikansi tersebut berada di atas nilai alpha yaitu >0.05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.2.4 Uji Hipotesis

4.2.4.1 Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Persamaan regresi linear berganda meliputi tiga variabel independen (bebas) yaitu Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa (X3) serta satu variabel dependen (Terikat) yaitu Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Y). Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, maka diperoleh hasil analisis regresi sebagai berikut :

Tabel 4.14

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.634	.544		-1.164	.247
	TOTAL_X1	.508	.052	.567	9.821	.000
	TOTAL_X2	.298	.059	.267	5.090	.000
	TOTAL_X3	.112	.031	.177	3.623	.000

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber : Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan data hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.14 di atas, maka model persamaan yang diperoleh sebagai berikut :

$$Y = -0.634 + 0.508\ X1 + 0.298X2 + 0.112X3 + e$$

Keterangan :

Y = Partisipasi MasyarakatDalam Pembangunan Desa

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X1 = Transparansi

X2 = Akuntabilitas

X3 = Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa

Berdasarkan persamaan di atas dapat diartikan bahwa:

1. Konstanta sebesar -0.634 menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas konstan maka nilai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa sebesar -0.634.
2. Koefisien regresi variabel Transparansi (X1) menunjukkan nilai positif sebesar 0.508. Disimpulkan bahwa adanya pengaruh Transparansi (X1) terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Y). Dengan kata lain nilai tersebut menunjukkan bahwa jika Transparansi meningkat sebesar 1 satuan maka PartisipasiMasyarakat Dalam Pembangunan Desaakanmeningkatsebesar 0.508 dan sebaliknya jika Transparansi menurun sebesar satu satuan maka Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa akan menurun sebesar 0.508.
3. Koefisien regresi variabel Akuntabilitas (X2) menunjukkan nilai positif sebesar 0,298. Disimpulkan bahwa adanya pengaruh Akuntabilitas (X2) terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Y). Dengan kata lain nilai tersebut menunjukkan bahwa jika Akuntabilitas meningkat sebesar 1 satuan maka Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa akan meningkat sebesar 0,298 dan sebaliknya jika Akuntabilitas menurun sebesar satu satuan maka Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa akan menurun sebesar 0,298.

4. Koefisien regresi variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa (X3) menunjukkan nilai positif sebesar 0.112. Disimpulkan bahwa adanya pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa (X3) terhadap Partisipasi MasyarakatDalam Pembangunan Desa (Y). Dengan kata lain nilai tersebut menunjukkan bahwa jika Kepercayaan Kepada Pemerintah Desameningkat sebesar 1 satuan maka Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa akan meningkat sebesar 0.112 dan sebaliknya jika Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa menurun sebesar satu satuan maka Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa akan menurun sebesar 0.112.

4.2.5 Uji Koefisien Determinasi R^2

Uji determinasi ini dilakukan untuk melihat dan mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa (X3) terhadap variabel dependen Y Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Y). Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, maka diperoleh hasil analisis regresi sebagai berikut :

Tabel 4.15

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.971[a]	.943	.941	.412

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X3, TOTAL_X2, TOTAL_X1

Sumber : Data Primer diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square (Koefisien Determinasi) sebesar 0,941 yang mana menunjukkan bahwa variabel dependen (Y) yang mampu dijelaskan oleh variabel independen X1,X2,

danX3sebesar 94.1%. Sedangkan sisanya sebesar 5.9% dijelaskan oleh variabel lainnya diluar dari pembahasan ini yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,971, nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat termasuk dalam kategori sangat kuat karena berada pada selang 0,80 – 1,00 yaitu hubungan antara variabel Transparansi, Akuntabilitas dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa bersifat positif, artinya jika variabel bebas semakin meningkat maka Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa juga akan mengalami peningkatan.

4.2.6 Hasil Uji Hipotesis

4.2.6.1 Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik T)

Uji-T ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini, uji T mempunyai kriteria dalam pengambilan keputusan yaitu membandingkan nilai T hitung denga nilai T tabel. Apabila nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel maka hipotesis alternatif (Ha) diterima yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2012:98).

Dasar pengambilan keputusan dalam uji T :

- H1 diterima dan hasilnya signifikan jika nilai T hitung > T tabel atau jika nilai Sig. < 0.05
- H1 ditolak dan hasilnya tidak signifikan jika nilai T hitung < T tabel atau jikai nilai Sig > 0.05

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, maka diperoleh hasil analisis regresi sebagai berikut :

Tabel 4.16

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.634	.544		-1.164	.247
	TOTAL_X1	.508	.052	.567	9.821	.000
	TOTAL_X2	.298	.059	.267	5.090	.000
	TOTAL_X3	.112	.031	.177	3.623	.000

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber : Data Primer diolah, 2019

T tabel : t (α / 2 ; n-k-1) = t (0.025 ; 104) = 1.98304

Keterangan :

α = Alpha

n = Jumlah sampel

k = Total Variabel X (bebas)

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel Transparansi (X1) menunjukkan nilai T hitung sebesar 9.821 dengan signifikansi sebesar 0,000 dan T tabel (α = 0,025 ; db residual = 104) adalah

sebesar 1.98304. Karena T hitung > T tabel yaitu 9.821 >1.98304atau nilai sig T (0.000) < α (0,05), yang berarti bahwa H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Transparansi (X1) berpengaruh secara parsial terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Y).

2. Variabel Akuntabilitas (X2) menunjukkan nilai T hitung sebesar 5.090 dengan signifikansi sebesar 0.000 dan T tabel (α = 0,025 ; db residual = 104) adalah sebesar 1.98304. Karena T hitung > T tabel yaitu 5.090>1.98304atau nilai sig T (0,000) < α (0,05), yang berarti bahwa H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas (X2) berpengaruh secara parsial terhadap Partisipasi MasyarakatDalam Pembangunan Desa (Y).
3. Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa (X3) menunjukkan nilai T hitung sebesar 3.623 dengan signifikansi sebesar 0.000 dan T tabel (α = 0,025 ; db residual = 104) adalah sebesar 1.98304. Karena T hitung > T tabel yaitu 3.623 >1.98304atau nilai sig T (0,000) < α (0,05), yang berarti bahwa H3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa (X3)berpengaruh secara parsial terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Y).

Setelah dilakukannya uji T, hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2) dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa (X3) memiliki pengaruh secara parsial terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Y).

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menguji pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa terhadapPartisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desadi Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal. Secara keseluruhan, hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda sebagai berikut:

1. Transparansi

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas sebelumnya yaitu pengujian hipotesis secara parsial (Uji T) menunjukkan bahwa variabel independen Transparansi (X1) menunjukkan nilai T hitung sebesar 9.821 dengan signifikansi sebesar 0,000 dan T tabel (α = 0,025 ; db residual = 104) adalah sebesar 1.98304. Karena T hitung > T tabel yaitu 9.821 >1.98304 atau nilai sig T (0.000) < α (0,05), yang berarti bahwa H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Transparansi(X1) berpengaruh secara parsial terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Y).

Hasil uji T (parsial) ini diperkuat oleh penelitian yang sudah lebih dahulu dilakukan oleh Lasa & Lestari (2018) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh secarapositif terhadap Partisipasi Masyarakat Desa. Persamaan dari penelitian adalah menggunakan metode analisis yang sama yaitu dengan menggunakan variabel independen Transparansi sebagai variabel bebas.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansiyangada di Desa Balapulang Wetan berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.Karena hasil uji parsial yang menyatakan Transparansi berpengaruh, dibuktikan dengan jawaban dari para responden pada kuesioner yang disebar yang menunjukkan bahwa Transparansi yang ada di Desa tempat responden menetap cukup baik.

2. Akuntabilitas (X2)

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas sebelumnya yaitu pengujian hipotesis secara parsial (Uji T) menunjukkan nilai T hitung sebesar 5.090 dengan signifikansi sebesar 0,000 dan T tabel (α = 0,025 ; db residual = 104) adalah sebesar 1.98304. Karena T hitung > T tabel yaitu 5.090> 1.98304 atau nilai sig T (0,000) < α (0,05), yang berarti bahwa H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas (X2) berpengaruh secara parsial terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Y).

Hasil uji T (parsial) ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lasa & Lestari (2018) yang melakukan penelitian mengenai Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara akuntabilitas terhadap partisipasi masyarakat desa. Akan tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Kartika (2018) yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitasyangada di Desa Balapulang Wetan sangat berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.Karena hasil uji parsial yang menyatakan Akuntabilitas berpengaruh, dibuktikan dengan jawaban dari para responden pada kuesioner yang disebar yang menunjukkan bahwa Akuntabilitas yang ada di Desa tempat responden menetap cukup baik.

3. Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa (X3)

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas sebelumnya yaitu pengujian hipotesis secara parsial (Uji T) menunjukkan bahwa variabel independen Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa (X3) menunjukkan nilai T hitung sebesar 3.623 dengan signifikansi sebesar 0,000 dan T tabel (α = 0,025 ; db residual = 104) adalah sebesar 1.98304. Karena T hitung > T tabel yaitu 3.623 >1.98304 atau nilai sig T (0.000) < α (0,05), yang berarti bahwa H3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa (X3) berpengaruh secara parsial terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Y).

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kepercayaan Kepada Pemerintah Desayangada di Desa Balapulang Wetan sangat berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.Karena hasil uji parsial yang menyatakan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa berpengaruh, dibuktikan dengan jawaban dari para responden pada kuesioner yang disebar yang menunjukkan bahwa Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa yang ada di desa tempat responden menetap cukup tinggi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 108 orang.

Berdasarkan pemaparan data hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan mengenai seberapa besar Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Balapulang Wetan melalui indikator dari ketiga variabel bebas di atas adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil uji regresi berganda, didapatkan hasil uji T (parsial) bahwa variabel Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal. Artinya semakin Transparan (Terbuka) pemerintah Desa maka akan semakin tinggi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, Semakin Akuntabilitas Pemerintah Desa maka akan semakin tinggi juga Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, begitu juga dengan Kepercayaan Kepada Pemerintah desa, semakin masyarakat percaya kepada pemerintah desa maka akan semakin tinggi pula Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian ini, saran-saran yang mungkin dapat diberikan peneliti untuk beberapa pihak yang mungkin saja dapat digunakan sebaik-baiknya, diantaranya :

1 Bagi Pemerintah Desa

Untuk Pemerintah Desa agar dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat mengenai program yang ada di desa tersebut dan juga meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa maupun program yang akan dilaksanakan di desa tersebut sehingga masyarakat dapat lebih mempercayai pemerintah desa dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa tersebut, sebab dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat meningkatkan keberhasilan program-program yang akan dilaksanakan di desa tersebut.

2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti masalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa agar dapat menggunakan alat uji lain atau dengan mencari dan menambahkan variabel-variabel lain yang sekiranya dapat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta memperluas sampel dan objek penelitian sehingga hasil selanjutnya dapat memberikan pemahaman yang lebih untuk peneliti, perusahaan, dan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Rahum. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, *3*(4), 1–14.

Akbar, D., Masyarakat, P., & Desa, P. (2017). Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun 2017. *Dhani Akbar, S.S., M.A.* *2*(1), 135–150.

Alberth, R., & Far, F. (2012). Peran Gender Dalam Kehidupan Rumah Tangga di Desa Liang Kabupaten Maluku Tengah (1), 13–27.

Ekonomi, F., & Negeri, U. (2015). *Pengaruh Akuntabilitas Publik*.

Ferina, I. S., Burhanuddin, & Lubis, H. (2014). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, *14*(3), 321–336.

Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

_____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

_____. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro

Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, *4*(8).

Ikhwandha, M. F. (2018). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Kepercayaan afektif dan kognitif Terhadap Minat Zakat Melalui Lembaga Zakat.

Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). *Sistem akuntansi pengelolaan dana desa*. *19*(2), 323–340.

Lasa, Y. A., Lestari, A. W., Studi, P., Administrasi, I., Tribhuwana, U., & Malang, T. (2018). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Partisipasi Masyarakat Desa.*7*(1), 70–76.

Mondong, H. (2013). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Ejournal Unstrat*, *5*(1), 1–18.

Nahruddin, Z. (2017). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *4*(2), 193–201.

Putra, M. A. R. (2013). Peningkatan Kepercayaan Publik Melalui Pemerintah Partisipasif. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

Rati, E. A., & Chotimah, U. (2017). *BANYUASIN*. *4*(1), 71–80.

Rosalina, M., Kunci, K., & Kinerja, : (2013). Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. *EJournal Pemerintahan Integratif*, *1*(1), 106–120. Retrieved from http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2013/02/02_ejournal_Maya_Rosalina (02-28-13-12-07-23).pdf

Saefulrahman, I. (2015). Kepemimpinan, modal sosial, dan pembangunan desa. *Cosmogov*, *1*(1), 149–166.

Sekaran, uma. 2003. *Metodologi penelitian untuk bisnis*. Jakarta : salemba 4

Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, *2*(1), 1.

Siregar, Syofian. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana.

Sugista, R. A. (2017). Pengaruh Transpansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Sosiologi*, *01*, 18.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta

Sujarweni, V dan Poly Endrayanto. 2012. *Statistika untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sunyoto, Danang, 2009. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*, edisi pertama, Media Pressindo, Yogyakarta.

Suryani, H. H. (2011). Politik Indonesia. *Politik Indonesia*, *1*(2), 206–222. Prasetyo, A. (2017). Menata Ulang Alokasi Dana Desa. *Media Indonesia*, p. http://www.mediaindonesia.com/read/detail/128167-m.

Tarigan, M. U., Bangun, P., & Susanti. (2013). Pengaruh Kompetensi, Etika, dan Fee Audit Terhadap Kulaitas Audit. *Akuntansi*, *13*(1), 803–832.

Todaro. (1998). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus: Program Alokasi Dana Desa di Desa Bialo Kabupaten Bulukumba). *Jurnal*, 1–8.

Tundunaung, L., Lumolos, J., & Mantiri, M. (2018). Issn : 2337 - 5736. Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, *1*(1), 1–11.

Waris, I. (2012). Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Kebijakan Publik*, *3*(1), 1–55.

Wiyono, Gendro. 2011. *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & Smart PLS 2.0*. Yogyakarta: Percetakan STIM YKPM.

LAMPIRAN

Lampiran 1

KUESIONER

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan sebagai penunjang skripsi saya yang berjudul "**Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan kepada Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa"** yang disusun sebagai salah satu syarat kelulusan program S1 Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, maka dengan ini saya :

Nama : Ricky Prayogi

No. Mahasiswa : 15312424

Jurusan : Akuntansi

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan kepada bapak/ibu bersedia mengisi kuesioner sesuai dengan penunjuk. Bantuan Bapak/Ibu saya harapkan demi keberhasilan penelitian ini. Jawaban dan identitas Bapak/Ibu akan terjamin kerahasiaannya.

Atas bantuan dan kesediaannya Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner, saya mengucapkan terimakasih.

1. DATA RESPONDEN :

Nama : .....

Jenis Kelamin : ◯ Perempuan ◯ Laki-Laki

Usia : ..... tahun

*) Boleh diisi atau tidak

2. PETUNJUK PENGISIAN

Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan memberi tanda (X) pada salah satu pilihan jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu. Tersedia empat pilihan jawaban dengan keterangan sebagai berikut :

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Setuju (S)
4. Sangat Setuju (SS)

Kuesioner: Transparansi Pengelolaan Dana Desa					
B. Transparansi		**STS**	**TS**	**S**	**SS**
1.	Laporan keuangan Pemerintah Desaditerbitkan secara periodik.	1	2	3	4
2.	Laporan keuangan dan pemaparan program Pemerintah Desa mudah diakses oleh publik secara bebas.	1	2	3	4
3.	Pemerintah Desa memaparkan segala aktivitas pengelolaan dana desa kepada masyarakat.	1	2	3	4
4.	Pemerintah Desa mempublikasikan laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan.	1	2	3	4
5.	Pemerintah Desa mengungkapkan kondisi keuangan secara menyeluruh kepada pihak yang berkepentingan.	1	2	3	4
6.	Pemerintah Desa mencantumkan kebijakannya secara tertulis dan mengungkapkannya kepada pihak yang berkepentingan.	1	2	3	4
7.	Kebijakan Pemerintah Desa yang berhubungan dengan dana desa dipahami oleh masyarakat.	1	2	3	4

Kuesioner: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa					
B. Akuntabilitas		**STS**	**TS**	**S**	**SS**
8.	Penyaluran dana desa dilakukan dengan melihat kebutuhan masyarakat	1	2	3	4
9.	Program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	1	2	3	4
10.	Setiap anggota masyarakat menerima manfaat dana desa secara adil.	1	2	3	4
11.	Setiap anggota masyarakat mendapat perlakuan yang adil dari pemerintah desa.	1	2	3	4
12.	Program penyaluran dana desa yang dilakukan tidak merusak stabilitas lingkungan	1	2	3	4

Kuesioner: Kepercayaan kepada Pemerintah Desa					
C. AFFECTIVE-BASED TRUST		**STS**	**TS**	**S**	**SS**
14.	Saya mempunyai kebebasan untuk memberikan ide dan pemikiran saya kepada Pemerintah Desa	1	2	3	4
15.	Pemerintah Desa akan membantu kesulitan yang saya hadapi saat saya berpartisipasi dalam program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.	1	2	3	4
16.	Jika saya menyampaikan masalah atas program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, saya memperoleh tanggapan secara baik	1	2	3	4
19.	Antara saya dengan Pemerintah Desa mempunyai kedekatan emosi.	1	2	3	4

D. COGNITIF-BASED TRUST		STS	TS	S	SS
19.	Aparat Pemerintah Desa bekerja secara profesional dan penuh dedikasi	1	2	3	4
20.	Saya tidak melihat alasan untuk meragukan kompetensi dan kemampuan aparat Pemerintah Desa dalam menjalankan pekerjaannya	1	2	3	4
21.	Saya bisa mengandalkan Pemerintah Desa untuk mengelola dana desa.	1	2	3	4
22.	Menurut saya, apparat Pemerintah Desa bisa dipercaya dan dihormati oleh berbagai pihak yang berkepentingan	1	2	3	4
23.	Orang-orang yang saya kenal beranggapan bahwa apparat Pemerintah Desa dapat dipercaya	1	2	3	4
24.	Jika orang tahu lebih banyak tentang apparat Pemerintah Desa, mereka akan tertarik untuk bekerja sama dengannya	1	2	3	4

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa					
E. Partisipasi Masyarakat		STS	TS	S	SS
25.	Saya sadar bahwa partisispasi saya sangatdibutuhkan untuk kemajuan desa	1	2	3	4
26.	Saya menyadari peran dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sangat berharga untuk pembangunan desa	1	2	3	4
27.	Saya aktif dalam kegiatan apapun yang terkait pembangunan yang ada di desa	1	2	3	4
28.	Saya peduli dengan kegiatan pemerintah yang ada di desa	1	2	3	4

29.	Tidak ada paksaan untuk selalu aktif dalam kegiatan di desa, yang artinya ada kebebasan untuk selalu mendukug dan aktif dalam kegiatan di desa	1	2	3	4
30.	Saya aktif dalam menyampaikan kritik dan saran pada kegiatan yang dilaksanakan di desa	1	2	3	4

Lampiran 2

Data Penyebaran Kuesioner

No.	Tanggal	Objek Penelitian	Jumlah Responden
1.	09-08-2019	Panitia Qurban Idhul Adha	26 Orang
2.	14-08-2019	Panitia Karnaval Desa Balapulang	21 Orang
3.	16-08-2019	Tasyakuran 17 Agustusan	19 Orang
4.	17-08-2019	Panitia Lomba Agustusan RW 01	8 Orang
5.	18-08-2019	Panitia Lomba Agustusan RW 03	7 Orang
6.	22-08-2019	Panitia Gerak Jalan Santai di Kelurahan Balapulang	14 Orang
7.	24-08-2019 s/d 26-08-2019	Pintu ke Pintu di RT 01-04	13 Orang

Lampiran 3

Hasil Data Responden Mengenai Pernyataan Transparansi

Nomer Responden	Transparansi						
	Q1.1	Q1.2	Q1.3	Q1.4	Q1.5	Q1.6	Q1.7
1	4	4	3	4	4	4	4
2	4	4	3	4	3	3	3
3	4	4	3	4	3	3	3
4	4	3	3	4	3	3	3
5	4	4	3	4	3	4	3
6	4	4	4	4	4	4	3
7	4	4	3	4	4	3	4
8	4	4	3	4	4	3	3
9	4	4	3	4	4	4	4
10	4	4	4	3	4	3	3
11	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	3	3	3
13	4	4	4	3	3	4	3
14	4	4	3	4	4	4	4
15	4	4	3	3	3	3	4
16	4	4	3	4	3	4	3
17	3	3	3	3	3	3	3
18	3	3	3	4	4	4	4
19	4	4	3	4	3	3	4
20	4	4	3	4	3	4	3
21	4	3	4	3	3	3	3
22	4	4	3	4	4	4	4
23	4	4	3	4	3	3	3
24	4	4	3	4	3	4	3
25	4	4	3	3	3	3	3
26	3	3	3	3	3	3	3
27	4	3	4	3	3	3	4
28	4	4	3	4	3	4	3
29	4	4	4	4	4	3	4
30	4	4	4	4	4	4	3
31	4	4	3	4	4	3	4
32	4	3	3	3	4	3	3
33	4	4	3	4	4	4	4
34	3	3	3	3	3	3	3
35	4	4	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4	4	3
37	4	4	3	3	3	3	4
38	4	3	3	3	3	3	3
39	4	3	3	4	3	3	3

40	4	4	3	4	4	4	3
41	4	4	3	4	4	3	4
42	3	3	3	3	3	3	3
43	4	4	4	4	4	4	4
44	4	4	3	3	3	4	3
45	4	4	3	4	3	4	3
46	4	4	3	4	4	4	3
47	4	3	4	4	4	3	4
48	4	4	3	4	4	3	3
49	4	3	3	4	4	3	4
50	4	4	3	4	4	4	4
51	4	4	3	3	3	4	4
52	4	4	4	4	4	4	4
53	4	3	3	4	4	3	3
54	4	4	3	4	4	3	3
55	3	3	3	3	3	3	3
56	4	4	3	3	3	4	4
57	4	3	4	3	3	3	4
58	4	4	3	4	3	3	4
59	4	4	3	4	4	3	3
60	3	3	3	3	3	3	3
61	4	4	3	3	3	3	3
62	4	4	4	3	3	3	4
63	4	4	3	4	3	3	3
64	4	4	3	3	3	3	4
65	4	4	3	3	3	3	3
66	4	4	3	3	4	3	4
67	4	4	4	4	4	3	3
68	4	3	3	3	4	3	3
69	4	4	3	3	3	3	3
70	4	4	3	3	3	3	4
71	4	4	4	4	4	3	4
72	4	4	3	3	4	3	4
73	4	4	4	4	4	4	3
74	4	4	4	4	4	4	4
75	4	4	4	4	4	4	3
76	4	4	4	4	4	4	4
77	4	3	3	4	3	3	3
78	4	4	3	4	3	3	4
79	4	4	3	4	3	3	3
80	4	4	4	3	4	3	4
81	4	4	3	3	3	3	3
82	4	4	3	3	3	3	4
83	4	3	3	3	4	3	3
84	4	4	4	4	4	3	4
85	4	3	3	4	3	4	3

86	4	4	3	4	3	4	3
87	3	3	3	3	3	3	3
88	4	4	3	3	3	3	3
89	4	4	4	4	3	3	4
90	4	4	3	4	3	4	3
91	4	3	3	3	3	3	3
92	4	4	3	3	3	3	3
93	4	3	3	3	4	3	4
94	4	3	4	4	4	3	3
95	4	4	3	3	4	3	3
96	4	4	3	3	4	4	3
97	4	3	3	3	3	3	3
98	4	4	4	4	4	4	4
99	3	3	3	3	3	3	3
100	4	4	4	4	4	4	4
101	4	4	4	3	4	3	4
102	4	4	4	3	4	4	3
103	4	3	3	3	3	3	4
104	4	4	3	4	4	4	4
105	4	4	4	3	4	3	3
106	4	4	4	3	4	4	4
107	4	4	4	3	4	3	3
108	4	4	4	4	4	4	4

Lampiran 4

Hasil Data Responden Mengenai Pernyataan Akuntabilitas

Nomor Responden	Akuntabilitas				
	Q2.1	Q2.2	Q2.3	Q2.4	Q2.5
1	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	3
5	4	3	4	4	4
6	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4
10	3	4	3	4	4
11	4	4	4	4	4
12	4	3	3	4	4
13	3	3	4	4	4
14	4	4	4	4	4
15	3	3	3	4	4
16	4	3	4	4	4
17	3	3	3	3	3
18	4	4	4	3	3
19	4	4	4	4	4
20	4	3	4	4	4
21	3	3	3	4	3
22	4	4	4	4	4
23	4	3	3	4	4
24	4	3	4	4	4
25	3	3	3	4	4
26	3	3	3	3	3
27	3	3	3	4	3
28	4	3	4	4	4
29	4	4	3	4	4
30	4	4	4	4	4
31	4	4	3	4	4
32	3	4	3	4	3
33	4	4	4	4	4
34	3	3	3	3	3
35	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4
37	3	3	3	4	4
38	3	3	3	4	3

39	4	3	3	4	3
40	4	4	4	4	4
41	4	4	3	4	4
42	3	3	3	3	3
43	4	4	4	4	4
44	3	3	4	4	4
45	4	3	4	4	4
46	4	4	4	4	4
47	4	4	3	4	3
48	4	4	3	4	4
49	4	4	3	4	3
50	4	4	4	4	4
51	3	3	4	4	4
52	4	4	4	4	4
53	4	4	3	4	3
54	4	4	3	4	4
55	3	3	3	3	3
56	3	3	4	4	4
57	3	3	3	4	3
58	4	3	3	4	4
59	4	4	3	4	4
60	3	3	3	3	3
61	3	3	3	4	4
62	3	3	3	4	4
63	4	3	3	4	4
64	3	3	3	4	4
65	3	3	3	4	4
66	3	4	3	4	4
67	4	4	3	4	4
68	3	4	3	4	3
69	3	3	3	4	4
70	3	3	3	4	4
71	4	4	3	4	4
72	3	4	3	4	4
73	4	4	4	4	4
74	4	4	4	4	4
75	4	4	4	4	4
76	4	4	4	4	4
77	4	3	3	4	3
78	4	3	3	4	4
79	4	3	3	4	4
80	3	4	3	4	4
81	3	3	3	4	4
82	3	3	3	4	4
83	3	4	3	4	3
84	4	4	3	4	4

85	4	3	4	4	3
86	4	3	4	4	4
87	3	3	3	3	3
88	3	3	3	4	4
89	4	3	3	4	4
90	4	3	4	4	4
91	3	3	3	4	3
92	3	3	3	4	4
93	3	4	3	4	3
94	4	4	3	4	3
95	3	4	3	4	4
96	3	4	4	4	4
97	3	3	3	4	3
98	4	4	4	4	4
99	3	3	3	3	3
100	4	4	4	4	4
101	3	4	3	4	4
102	3	4	4	4	4
103	3	3	3	4	3
104	4	4	4	4	4
105	3	4	3	4	4
106	3	4	4	4	4
107	3	4	3	4	4
108	4	4	4	4	4

Lampiran 5

Hasil Data Responden Mengenai Pernyataan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa

Nomor Responden	Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa									
	Q3.1	Q3.2	Q3.3	Q3.4	Q3.5	Q3.6	Q3.7	Q3.8	Q3.9	Q3.10
1	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3
2	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4
3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4
4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4
5	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4
8	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3
9	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4
10	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4
13	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3
14	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3
15	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3
16	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4
19	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4
20	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3
21	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3
22	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4
23	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4
24	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4
25	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
27	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3
28	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4
29	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4
32	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3
33	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
35	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

37	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3
38	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3
39	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4
40	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4
41	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3
45	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4
46	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4
47	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4
48	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4
49	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4
50	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4
51	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4
54	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
56	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3
57	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3
58	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4
59	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
61	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3
62	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3
63	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4
64	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3
65	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3
66	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3
67	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
68	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3
69	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3
70	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3
71	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
72	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
75	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
77	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4
78	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4
79	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4
80	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3
81	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3
82	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3

83	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3
84	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
85	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4
86	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
88	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3
89	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4
90	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4
91	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3
92	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3
93	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3
94	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4
95	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3
96	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3
97	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3
98	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
99	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
101	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3
102	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3
103	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3
104	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4
105	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3
106	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3
107	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3
108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Lampiran 6

Hasil Data Responden Mengenai Pernyataan Partisipasi Masyarakat

Nomor Responden	Partisipasi Masyarakat					
	Q4.1	Q4.2	Q4.3	Q4.4	Q4.5	Q4.6
1	4	4	3	4	4	4
2	4	4	3	4	3	3
3	4	4	3	4	3	3
4	4	3	3	4	3	3
5	4	4	3	4	3	4
6	4	4	4	4	4	4
7	4	4	3	4	4	3
8	4	4	3	4	4	3
9	4	4	3	4	4	4
10	4	4	4	3	4	3
11	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	3	3
13	4	4	4	3	3	4
14	4	4	3	4	4	4
15	4	4	3	3	3	3
16	4	4	3	4	3	4
17	3	4	3	3	3	3
18	3	3	3	4	4	4
19	4	4	3	4	3	3
20	4	4	3	4	3	4
21	3	4	3	3	3	3
22	4	4	3	4	4	4
23	4	4	3	4	3	3
24	4	4	3	4	3	4
25	4	4	3	3	3	3
26	3	3	3	3	3	3
27	4	3	3	3	3	3
28	4	4	3	4	3	4
29	4	4	4	4	4	3
30	4	4	4	4	4	4
31	4	4	3	4	4	3
32	3	3	3	3	3	3
33	4	4	3	4	4	4
34	3	4	3	3	3	3
35	4	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4	4
37	4	4	3	3	3	3
38	4	3	3	3	3	3
39	4	3	3	4	3	3

40	4	4	3	4	4	4
41	4	4	3	4	4	3
42	3	3	3	3	3	3
43	4	4	4	4	4	4
44	4	4	3	3	3	4
45	4	4	3	4	3	4
46	4	4	3	4	4	4
47	4	3	4	4	4	3
48	4	4	3	4	4	3
49	4	3	3	4	4	3
50	4	4	3	4	4	4
51	4	4	3	3	3	4
52	4	4	4	4	4	4
53	4	3	3	4	4	3
54	4	4	3	4	4	3
55	3	3	3	3	3	3
56	4	4	3	3	3	4
57	4	3	4	3	3	3
58	4	4	3	4	3	3
59	4	4	3	4	4	3
60	3	3	3	3	3	3
61	4	4	3	3	3	3
62	4	4	4	3	3	3
63	4	4	3	4	3	3
64	4	4	3	3	3	3
65	4	4	3	3	3	3
66	4	4	3	3	4	3
67	4	4	4	4	4	3
68	4	3	3	3	4	3
69	4	4	3	3	3	3
70	4	4	3	3	3	3
71	4	4	4	4	4	3
72	4	4	3	3	4	3
73	4	4	4	4	4	4
74	4	4	4	4	4	4
75	4	4	4	4	4	4
76	4	4	4	4	4	4
77	4	3	3	4	3	3
78	4	4	3	4	3	3
79	4	4	3	4	3	3
80	4	4	4	3	4	3
81	4	4	3	3	3	3
82	4	4	3	3	3	3
83	4	3	3	3	4	3
84	4	4	4	4	4	3
85	4	3	3	4	3	4

86	4	4	3	4	3	4
87	3	3	3	3	3	3
88	4	4	3	3	3	3
89	4	4	4	4	3	3
90	4	4	3	4	3	4
91	4	3	3	3	3	3
92	4	4	3	3	3	3
93	4	3	3	3	4	3
94	4	3	4	4	4	3
95	4	4	3	3	4	3
96	4	4	3	3	4	4
97	4	3	3	3	3	3
98	4	4	4	4	4	4
99	3	3	3	3	3	3
100	4	4	4	4	4	4
101	4	4	4	3	4	3
102	4	4	4	3	4	4
103	4	3	3	3	3	3
104	4	4	3	4	4	4
105	4	4	4	3	3	3
106	4	4	4	3	4	4
107	4	4	4	3	3	3
108	4	4	4	4	4	4